

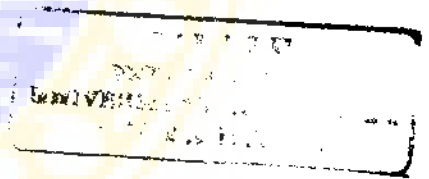
**EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT  
MENGUKUR KINERJA DALAM INSTANSI PEMERINTAH**  
(Studi Kasus Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur)

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



30/5  
11/05  
e



**DIAJUKAN OLEH :**  
**YENI NURHIDAYATI**  
**No. Pokok : 040016913**

**KEPADA**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2005**

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT MENGUKUR  
KINERJA DALAM INSTANSI PEMERINTAH**

**(Studi Kasus Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur)**

DIAJUKAN OLEH

YENI NURHIDAYATI

No. Pokok : 040016913

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

  
Drs. Agus Widodo, M. Msi, Ak.

TANGGAL.....  
3/2-2006

KETUA PROGRAM STUDI,

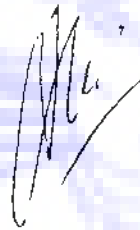
  
Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak.

TANGGAL.....  
6-2-06

Surabaya, 5-8-2005

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



**Drs. Agus Widodo, M. Msi, Ak.**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Penerapan Anggaran Kinerja sebagai Alat Ukur Kinerja Dalam Instansi Pemerintah”

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwasannya dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang sempurna.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.Ec.H.Karjadi Mintaroem, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs.M.Suyunus, MAFIS, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
3. Bapak Drs. Agus Widodo Mardijuwono, Msi. Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu atas doa restunya dan dukungan yang selalu diberikan (maafkan anakmu atas molornya studiku).

5. Ibu Kepala Bagian Keuangan, Ibu Sri Budiarti dan segenap pihak di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Calon suamiku tercinta, yang setia mendampingiku selama ini. Calon adik ipar, Juli alias Yoyok bin Paijo, terima kasih atas pinjaman printerku dan bantuan penyelesaian skripsiku.
7. Teman-temanku, Nasrullah yang telah memberikan ide judul penelitianku, Mira (makasih ya atas tumpangan tidurnya dan telah mendampingiku selama sidang), Ike (makasih juga telah menemaniku selama ujian), mbak Sri astutik, Sri wayuti alias Yuti dan konco-koncoku yang lain yang tidak bisa disebutin satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Untuk Ratna dan Tyas arek IESP, *sing giat nyusun skripsine yo, sorry tak tinggal duluan.*

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat untuk semua yang membacanya dan bisa menambah khasanah wacana untuk dunia akuntansi khususnya di Universitas Airlangga.

Penulis

## ABSTRAKSI

Dalam mengukur keberhasilan maupun kegagalan suatu kinerja dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai instansi pemerintah saat ini sulit untuk dilaksanakan secara objektif meskipun telah ada suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja ini lebih ditekankan pada kemampuan dari instansi pemerintah dalam menyerap anggaran, artinya Dinas Perikanan dan Kelautan dinyatakan berhasil melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya apabila telah menyerap seratus persen anggaran yang disediakan tanpa memperhatikan seberapa jauh dampak yang dicapai dalam pelaksanaan program.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, untuk membandingkan pelaksanaan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja dengan sistem anggaran tradisional dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja.

Peneliti mengambil kasus pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Di dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode: survey lapangan, observasi lapangan yang terdiri dari observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada.

Penyusunan dan pelaksanaan APBD Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2004 adalah kali pertama digunakannya pendekatan kinerja sesuai dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 sebagai pedoman pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2004 akuntabilitas Dinas masih hanya berfokus pada sisi pengelolaan keuangan daerah. Pelaporan keuangannya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran dan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Anggaran, Kinerja, APBD

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstraksi.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Skripsi.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Anggaran.....	8
2.1.1 Pengertian Anggaran.....	8
2.1.2 Karakteristik Anggaran.....	8
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Anggaran.....	9
2.1.4 Keuntungan dan Keterbatasan Anggaran.....	11
2.1.5 Sistem Penyusunan Anggaran.....	12
2.2 Anggaran Kinerja.....	16
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.....	19
2.3.1 Penyusunan Arah dan Kebijakan APBD.....	19

2.3.2	Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD.....	20
2.3.3	Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.....	21
2.4	Pengukuran Kinerja.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>27</b>
3.1	Pendekatan Penelitian.....	27
3.2	Ruang Lingkup Penelitian.....	27
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4	Desain Penelitian.....	28
3.5	Prosedur Pengumpulan Data.....	30
3.6	Metode dan Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>32</b>
4.1.	Gambaran Umum.....	32
4.1.1	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pokok Organisasi.....	32
4.1.2	Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan .....	34
4.2.	Dekripsi Hasil Penelitian.....	36
4.2.1	Studi Pendahuluan.....	36
4.3.	Pembahasan.....	39
4.3.1	Pra Penyusunan APBD 2004.....	39
4.3.2	Penyusunan dan Pelaksanaan APBD 2004.....	45
4.3.3	Pelaporan APBD 2004.....	50
4.3.4	Pengawasan dan Pengendalian.....	52
4.4	Tolok Ukur Kinerja Berdasarkan Kepmendagri	



No.29 Tahun 2002.....	53
4.5 Indikator Kinerja.....	56
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



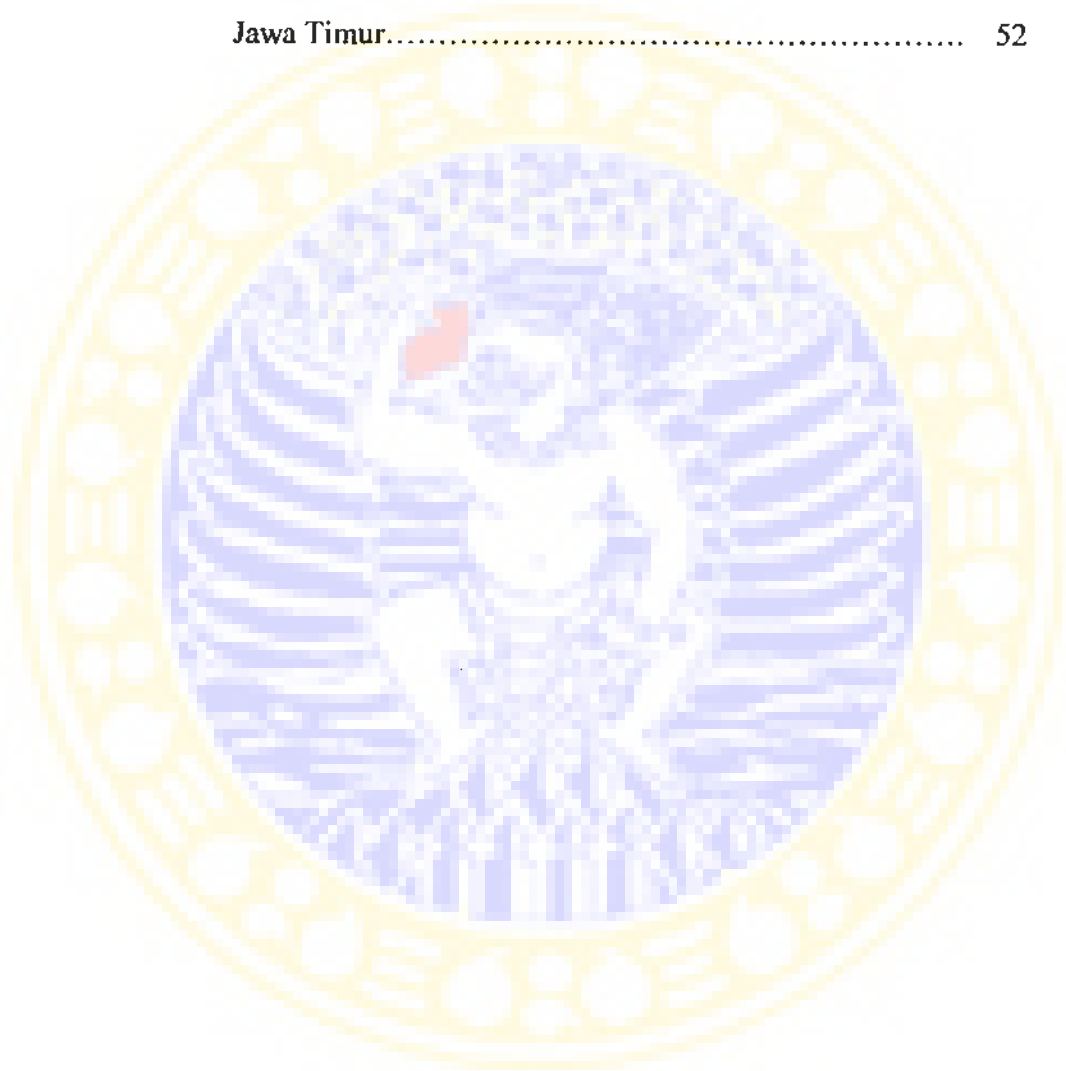
## DAFTAR GAMBAR

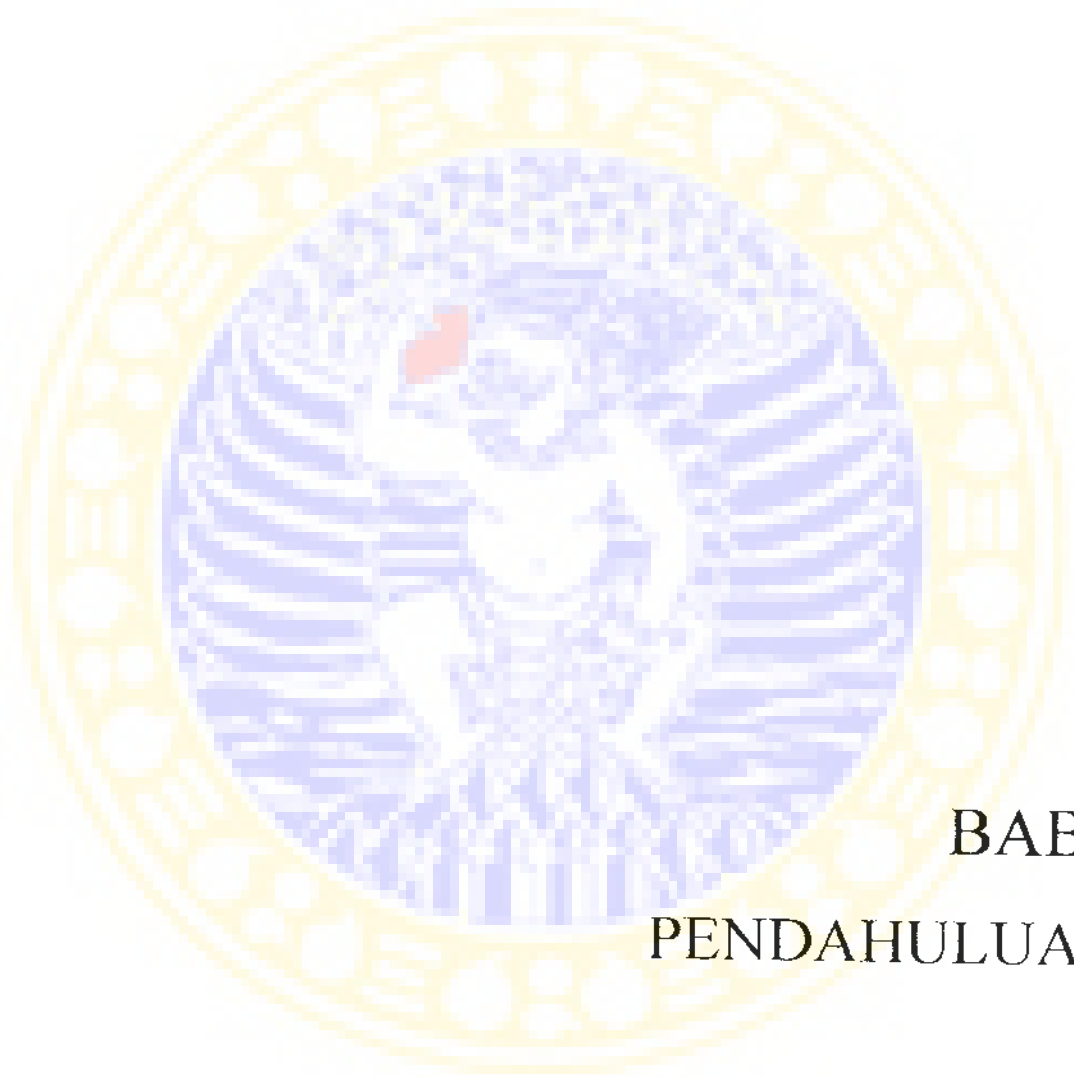
Gambar 2.1	Mekanisme Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD.....	20
Gambar 2.2	Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD.....	21



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur APBD dengan Pendekatan Kinerja Propinsi/ Kabupaten/Kota.....	23
Tabel 4.1	Struktur APBD Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.....	52





# BAB I PENDAHULUAN

## **BAB 1**

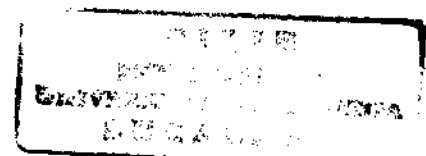
### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran merupakan suatu instrumen di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Bahkan di akuntansi pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah bagian penting dalam aktivitas pemerintah.

Pada dasarnya, peranan anggaran dalam organisasi pemerintah sama dengan peranan anggaran dalam organisasi komersial. Baik dalam organisasi pemerintah maupun dalam organisasi komersial, anggaran ditujukan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan adalah pencatatan anggarannya.

Dalam organisasi pemerintah, yang menggunakan akuntansi dana, anggaran merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus akuntansi, maka dilakukan pencatatan pembentukan dan realisasi anggaran, hal ini dimaksudkan agar mudah dalam pengendalian dan penentuan kesesuaian segala aktivitas yang dilakukan dengan peraturan yang tercermin dalam anggaran. Sedangkan dalam organisasi komersial, anggaran dimaksudkan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian tanpa dimaksudkan untuk tujuan pencatatan.



Akuntansi pemerintah sebagai sebuah sistem dalam perkembangannya membahas bagaimana pemerintah suatu negara mengatur konsep keuangan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan, juga bagaimana mengatur pembukuan atau akuntansinya secara berkesinambungan dan seragam antar unit instansi pemerintah baik berjenjang maupun paralel. Dengan demikian laporan akuntansi yang dibuat diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan komunikatif, sehingga dapat dimanfaatkan secara tepat oleh instrumen-instrumen pemerintahan guna terwujudnya pembangunan. Pemerintah selaku pelaksana pembangunan tentunya juga memerlukan suatu sistem akuntansi pemerintahan sebagai salah satu mekanisme informasi akuntansi.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah saat ini memperbesar kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Setelah mengalami banyak pergantian undang-undang, peraturan perundangan tersebut dirasakan oleh masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, karena masyarakat saat ini menginginkan suatu perubahan ke arah perbaikan khususnya dalam hal otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah yang mulai digencarkan oleh pemerintah pusat dengan program desentralisasinya dan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan semua kegiatan pemerintah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang tersebut

ditindaklanjuti dengan pemberlakuan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pada bulan Juni 2002, Menteri Dalam Negeri memutuskan diberlakukannya UU No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebelum Kepmendagri No. 29 tahun 2002 diberlakukan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada menganut sistem anggaran tradisional. Dalam sistem anggaran tradisional, pemerintah daerah hanya berusaha bagaimana cara menghabiskan sumber-sumber pendapatan yang ada ke dalam anggaran belanja yang telah diusulkan.

Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, dan terdapat dalam PP No. 150 Tahun 2000, sistem anggaran yang berlakupun menggunakan pendekatan kinerja. Dalam sistem anggaran kinerja, APBD daerah disusun mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan dan juga berdasar pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Meskipun penganggaran merupakan satu tugas pemerintah dari seluruh negara setiap tahun, berbagai persoalan masih sulit diselesaikan. Hal ini mengingat proses ini sangat luas dengan melibatkan banyak sumber daya, dipengaruhi juga oleh faktor internal dan eksternal dari pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi dan politik. Untuk itu anggaran kinerja sangat penting

terutama bagi pemerintah sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas dari kinerjanya terhadap anggaran itu sendiri, apakah telah merealisasikan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan.

Pada setiap akhir tahun, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Hal ini menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan roda pemerintah, pembangunan dan pelayan sosial masyarakat dengan baik sesuai peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Secara langsung maupun tidak langsung dengan disusunnya anggaran akan mengakibatkan perbaikan dari suatu organisasi serta mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari banyaknya manfaat yang didapat dari adanya anggaran maka sudah seharusnya jika instansi pemerintah akan menerapkan penggunaan anggaran sebagai alat pengukuran kinerja. Dengan menetapkan tujuan dalam bentuk kriteria kinerja yang bisa diukur, anggaran hadir sebagai standar-standar dimana hasil operasi aktual yang dicapai bisa dibandingkan dengan standar tersebut.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah “ Apakah anggaran dengan pendekatan kinerja telah digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur?.”

## **1.3 Tujuan Peneleitian**

Dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan tujuan yang diharapkan antara lain :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
2. Untuk membandingkan antara sistem anggaran dengan pendekatan tradisional dengan sistem anggaran yang menggunakan pendekatan kinerja.
3. Untuk mengetahui apakah anggaran kinerja telah digunakan sebagai alat ukur kinerja manajemen dan untuk mengetahui ukuran kinerja yang lebih sesuai.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Membantu instansi pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dalam memberikan jasa kepada masyarakat atau pencapaian target tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dapat mengetahui seberapa besar kesesuaian pelaksanaan aktivitas dengan peraturan yang telah ditetapkan serta seberapa besar tanggung jawab dan aspek kinerja dari masing-masing.
4. Pengembangan khasanah ilmu pengetahuan tentang anggaran kinerja serta dapat memberikan informasi usulan ukuran kinerja manajemen pada instansi pemerintah yang lebih realistis sehingga dapat memberikan gambaran yang wajar mengenai kinerja pemerintah.

### **1.5 Sistematika Skripsi**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang masalah yaitu anggaran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang sistem anggaran kinerja, APBD dengan pendekatan kinerja dan pengukuran kinerja dengan menggunakan anggaran kinerja. Landasan teori ini digunakan sebagai dasar berpikir dan menganalisis masalah yang ada.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dengan pendekatan kualitatif, jenis, dan sumber data yang berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, prosedur

pengumpulan data yang berpedoman pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, serta teknik dalam menganalisis data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian, analisis dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dari data-data yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan konsep yang ada dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 untuk permasalahan di lapangan, serta mengevaluasi anggaran kinerja yang merupakan salah satu sistem untuk mengukur kinerja terutama dalam instansi pemerintah.

#### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dari simpulan ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat bermanfaat bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Anggaran**

##### **2.1.1 Pengertian Anggaran**

Penganggaran adalah proses alokasi sumber-sumber yang terbatas kepada aktivitas yang tidak terbatas. Sedangkan anggaran adalah sejumlah rupiah yang direncanakan untuk aktivitas yang dilakukan pada periode waktu tertentu.

Menurut The National Committee Governmental Accounting (NCGA) “ *A budget is a financial operation embodying an estimated of purposed expenditure for a given period of time and the propose mean to financing them.*” Artinya anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Secara umum anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode dan sumber pendapatan. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*), dan *trade off*.

##### **2.1.2 Karakteristik Anggaran**

Menurut Anthony dan Govindarajan (1999:373), karakteristik dari anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran dapat menaksir keuntungan potensial dari unit bisnis.
2. Anggaran dinyatakan dalam satuan moneter atau satuan lain.
3. Umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
4. Anggaran berisi kesanggupan atau komitmen manajemen untuk mencapainya, artinya para manajer bersedia menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam anggaran.
5. Usulan anggaran harus *di-review* dan disetujui oleh pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
6. Setelah disetujui, anggaran tidak dapat dirubah kecuali pada kondisi tertentu.
7. Secara indikator, kinerja anggaran aktual dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

### **2.1.3 Tujuan dan Manfaat Anggaran**

Menurut Anthony dan Govindarajan, tujuan utama penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Memperjelas rencana strategis.
2. Mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas dari beberapa bagian organisasi.
3. Melimpahkan tanggung jawab kepada para manajer, memberikan otorisasi besarnya biaya yang boleh dikeluarkan untuk dibelanjakan dan menginformasikan pada mereka mengenai kinerja yang diharapkan.
4. Memperoleh komitmen bahwa anggaran merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer sesungguhnya.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penyusunan anggaran, diantaranya pada saat penyusunan, anggaran dapat meningkatkan kualitas komunikasi antar sesama manajer dan antara para manajer dengan atasannya. Sedangkan saat penerapannya, anggaran dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mengurangi penyimpangan yang mungkin terjadi dari rencana yang sudah ditentukan.

Horngren (1986:186) mengemukakan bahwa anggaran mempunyai tiga manfaat, yaitu :

1. Secara formal memberikan tanggung jawab kepada manajer atas segala perencanaan, maka penganggaran akan memaksa manajer untuk berpikir jauh kedepan.
2. Penganggaran memberikan harapan pasti yang merupakan kerangka kerja terbaik untuk menilai prestasi kerja.
3. Penganggaran membantu para manajer untuk mengkoordinasikan segala upaya agar sasaran perusahaan secara keseluruhan dapat tercapai.

Sedangkan Mulyadi dan Supriyono berpendapat bahwa anggaran bermanfaat sebagai :

1. Perencanaan kegiatan organisasi dalam jangka pendek.
2. Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek.
3. Alat komunikasi rencana kepada berbagai pimpinan sub divisi atau sub bidang.
4. Alat untuk memotivasi para pimpinan untuk mencapai tujuan bidang yang dipimpinya.

5. Alat untuk pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi berbagai bidang kegiatan dan pimpinannya.
6. Alat pendidikan para pimpinan organisasi.

#### **2.1.4 Keuntungan dan Keterbatasan Anggaran**

Menurut Mulyadi dan Supriyono (1989:94) dengan menggunakan anggaran akan memberikan beberapa kelebihan pada suatu unit organisasi yang memakainya, antara lain :

1. Menyediakan suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah.
2. Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-maslah yang dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk mempelajari dengan seksama masalah sebelum diputuskan.
3. Menyediakan cara-cara untuk memformulasikan usaha perencanaan.
4. Menutup kemacetan potesial sebelum kemacetan tersebut terjadi.
5. Membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana operasi berbagai bagian yang ada pada organisasi sehingga keputusan akhir dan rencana dapat terintegrasikan dan komprehensif.
6. Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali kebijaksanaan dan pedoman dasar yang sudah ditentukan.

Sedangkan keterbatasan yang dimiliki anggaran diantaranya sebagai berikut :

1. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi yang ketepatannya tergantung pada kemampuan mengestimasi. Ketidaktepatan dalam mengestimasi mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat tercapai.



2. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu.
3. Perencanaan dan anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen dan pertimbangan manajemen.

### 2.1.5 Sistem Penyusunan Anggaran

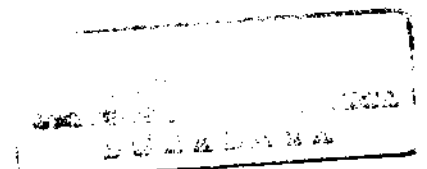
Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dinyatakan bahwa “Usulan program kegiatan dan anggaran..... disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.” Sehingga dapat diketahui bahwa Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tersebut menekankan pada sistem anggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja (*Performance Budgeting System*).

Berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran antara lain :

1. Sistem Anggaran Tradisional (*Traditional Budget System*)

Dalam sistem anggaran ini disusun berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran.

Sistem anggaran tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada segi pertanggungjawaban keuangan atau dana dari sudut akuntansinya saja tanpa diuji efisien tidaknya penggunaan dana tersebut.



## 2. Sistem Anggaran Kinerja (*Performance Budget System*)

Sistem anggaran kinerja tidak menekankan pada seberapa banyak uang yang dikeluarkan, tetapi lebih menekankan pada rencana kegiatannya, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, bagaimana pengalokasikan biaya agar digunakan secara efektif dan efisien. Berhasil tidaknya sistem anggaran kinerja terletak pada *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil yang dicapai dengan menetapkan standar biaya (*cost standart*). Dengan standar biaya tersebut, disusun anggaran tahun berikutnya dan bisa disesuaikan dengan pertimbangan yang logis.

Kelebihan pendekatan sistem anggaran ini adalah bahwa kegiatan didasarkan pada efisiensi dengan adanya standar biaya berdasarkan kegiatan masa lalu. Kelemahannya adalah sulitnya mengukur kinerja setiap aktivitas pemerintah, disamping kesiapan aparat negara dalam melaksanakan pendekatan ini dengan baik.

## 3. *Planning, Programming, and Budgeting System* (PPBS)

Sistem pendekatan ini merupakan variasi dari anggaran kinerja. Pendekatan ini menggabungkan tiga unsur yaitu perencanaan hasil, pemrograman kegiatan fisik untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan penganggaran (alokasi dana) untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sistem ini lebih menekankan pada penyusunan rencana dan program. Proses penyusunan rencana sendiri dimulai dari menentukan tujuan yang hendak dicapai, mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu, melihat prospek

perkembangan yang akan datang, dan menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang dilaksanakan.

Sedangkan dalam penyusunan anggaran yang harus dilakukan diantaranya:

- a. Perumusan tujuan organisasi dan unit-unit di bawahnya.
- b. Menyusun program berdasarkan tujuan-tujuan yang sama dari setiap unit.
- c. Program yang telah tersusun dirinci lagi menjadi aktivitas-aktivitas (*program element*).
- d. Setiap elemen dibuat analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit elemen*).
- e. Menghitung biaya dan manfaat dalam level program.

Kelemahan pendekatan ini adalah memerlukan waktu yang lama (*time consuming*) dan secara teknis sulit dipraktikkan oleh aparat penyusunan anggaran. Hal ini disebabkan oleh mengukur manfaat dengan nilai uang (*monetized*) tidak mudah. Oleh karena itu, metode ini secara konsep cukup memadai, tetapi di dalam kenyataannya banyak ditinggalkan oleh berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia.

#### 4. Anggaran Program (*Program Budget*)

Anggaran disusun berdasarkan pekerjaan atau tugas yang dijalankan. Pendekatan ini mengutamakan efektifitas.

#### 5. Anggaran Dasar Nol (*Zero Base Budgeting*)

Menurut Pyhrr (1986) *Zero Base Budgeting* adalah “ Keseluruhan kegiatan, perencanaan, penganggaran yang memaksa tiap manajer menyesuaikan keseluruhan permintaan anggaran dalam bentuk rinci yang dimulai dari dasar nol

(*zero base*) dan mengalihkan tanggung jawab kepada setiap manajer untuk mengkaji mengapa ia harus membelanjakan dana tersebut.

Pendekatan ini merupakan variasi dari kinerja anggaran yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran. Oleh karenanya, menurut pendekatan ini, penyusunan anggaran dengan didasarkan pada anggaran tahun lalu mengandung resiko tersusunnya anggaran yang inefisien, sehingga meskipun pada tahun sebelumnya telah dilakukan proses penganggaran, anggaran tidak akan bergantung pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi jika anggaran tahun lalu inefisien, sehingga pendekatan ini menuntut perencanaan yang baik melalui pengkoordinasian bagian perencanaan dan penganggaran dalam satu wadah organisasi.

Tiga langkah dalam penyusunan *Zero Base Budget* yaitu :

- a. Identifikasi unit keputusan.
- b. Membangun paket keputusan.
- c. Meninjau ulang dan peringkat paket keputusan.

Keuntungan pendekatan ini adalah menghapus ketidakefektifan satu program, memungkinkan program baru, pada setiap aktivitas ada tujuan yang jelas dan melibatkan seluruh level. Akan tetapi kerugiannya adalah terlalu optimis bahwa perhitungannya mudah, tidak mudah mengkonsolidasi unit, dan rangking serta menjadi tidak sesuai dengan tujuannya.

#### 6. *Incremental Budget*

*Incremental Budget* adalah sistem anggaran dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan

usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Masalah utama dalam sistem ini adalah bagaimana menaikkan atau menurunkan (*incremental*) dari angka anggaran tahun sebelumnya, sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya.

#### 7. *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF)

MTEF adalah suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintahan non departemen. Keberhasilan sistem anggaran ini tergantung pada mekanisme pengambilan keputusan anggaran secara agregat yang didasarkan pada skala prioritas.

Tujuan yang diharapkan dari sistem ini adalah keseimbangan makro ekonomi dengan mengembangkan konsistensi dan rerangka kerja sumber daya secara realistis dan pengalokasian sumber daya untuk prioritas strategi antar sektor dan dalam sektor.

Sasaran dalam MTEF antara lain :

- a. Menciptakan keseimbangan ekonomi makro dengan mengembangkan kerangka sumber daya yang konsisten dan realistis.
- b. Meningkatkan alokasi sumber daya melalui strategi prioritas lintas sektoral.
- c. Meningkatkan kemampuan untuk memperkirakan kebijakan pembiayaan.
- d. Memberikan anggaran yang ketat terkait kewenangan unit kerja dalam menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

### **2.2 Anggaran Kinerja**

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam

manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut adalah reformasi anggaran (*budgeting reform*). Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Aspek utama reformasi anggaran (*budgeting reform*) adalah perubahan dari anggaran tradisional (*traditional budget*) ke anggaran kinerja (*performance budget*). Munculnya reformasi sektor publik yang mengadopsi pendekatan *new publik management* dan *reinventing government*, pada dasarnya ingin meletakkan prinsip-prinsip manajemen bisnis ke dalam tubuh organisasi sektor publik.

Anggaran kinerja (*performance budget*) pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintahan yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Sistem anggaran kinerja merupakan salah satu pendekatan anggaran yang dapat memenuhi tuntutan era *New Public Management* yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan serta sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintahan yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan

tersebut mencakup penentuan unit kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Suatu anggaran dianggap atau dinilai sebagai pencerminan program kerja ciri utamanya adalah :

- 1) Secara umum sistem ini mengandung tiga unsur pokok, yaitu :
  - a. Pengeluaran pemerintah diklasifikasi menurut program dan kegiatan.
  - b. Pengukuran hasil kerja (*performance measurement*)
  - c. Pelaporan program (*program reporting*)
- 2) Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan pada pengawasan.
- 3) Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan output.
- 4) Bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja.

Sebagai pendekatan baru dalam sistem anggaran publik, pendekatan kinerja merupakan teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*workload*) dan biaya per unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur dengan diawali dari pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen.

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional. Anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.



Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal.

## **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.3.1 Penyusunan Arah dan Kebijakan APBD**

Kebijakan anggaran yang terdapat dalam arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan daerah sehingga dijadikan dasar penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD diawali dengan penjangkauan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Renstrada dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD yaitu :

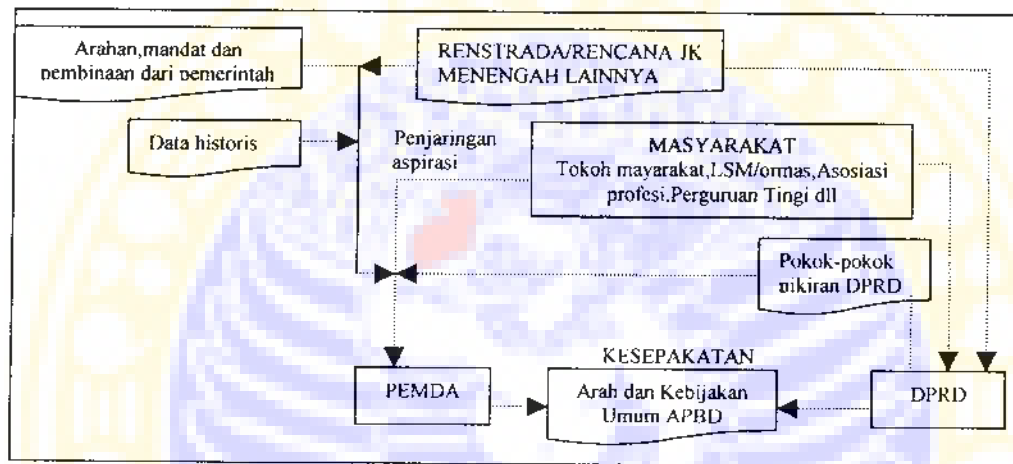
1. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam renstrada dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan oleh daerah;
2. Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah;
3. Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran;
4. Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemda;



5. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberikan peluang untuk pengembangan kreativitas pelaksanaannya.

Mekanisme dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD dapat dilaksanakan seperti pada gambar 2.1.

Gambar 2.1  
Mekanisme Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD



Kepmendagri No.29 Th.2002

### 2.3.2 Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD

Arah dan kebijakan umum APBD kemungkinan dapat dicapai melalui satu atau lebih strategi sehingga terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya :

1. Keterkaitan dengan pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam arah dan kebijakan umum APBD.
2. Kelebihan dan kelemahan daerah saat ini.
3. Peluang dan tantangan daerah pada masa yang akan datang.
4. Aspek resiko dan manfaat dalam implementasinya.

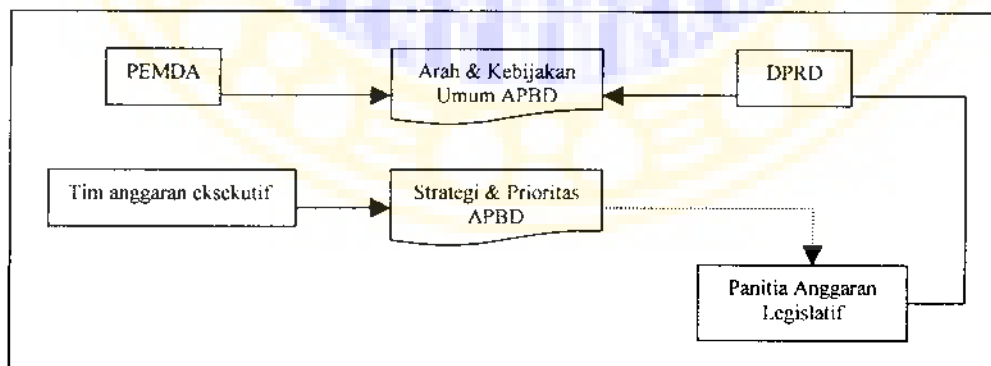
Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau program yang harus dilakukan terlebih dahulu dibandingkan program yang lain. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prioritas yaitu :

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Kemampuan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam arah dan kebijakan APBD.
3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program.

Mekanisme dalam penyusunan strategi dan prioritas APBD terlihat seperti gambar 2.2.

Gambar 2.2

### Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD



### 2.3.3 Penyusunan dan Pelaksanaan APBD

Pedoman dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah arah dan kebijakan umum, strategi dan prioritas serta anggaran satuan kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat :

- 1) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
- 2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan
- 3) Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal atau pembangunan.

Satuan kerja harus menyusun rencana strategis (Renstra) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip). Lakip adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan anggaran. Renstra adalah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra memuat pernyataan tentang:

- 1) Visi, adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan.
- 2) Misi, adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik.
- 3) Tujuan, adalah implementasi dari pernyataan misi, sehingga dapat diketahui sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money*, struktur APBD berdasarkan Kepmendagri no 29 Tahun 2002 terlihat dalam tabel 2.1.

#### 2.4 Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*)

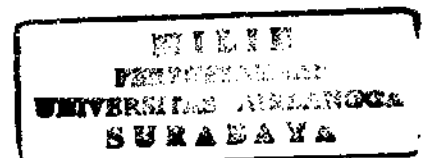
Pengendalian merupakan salah satu proses manajemen yang akan memberikan manfaat untuk mengevaluasi langkah-langkah yang akan diambil dalam melaksanakan rencana yang telah dibentuk.

Menurut Hansen dan Mowen (2000:7), umpan balik tersebut dapat berupa informasi keuangan dan non keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan formal yang membandingkan data aktual dengan data yang direncanakan, dimana laporan ini disebut sebagai laporan kinerja

Dalam sistem anggaran kinerja, fokus dari indikator dan tolok ukur kinerja bergeser kepada hasil, manfaat dan dampak dari kegiatan yang direncanakan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran serta proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi kinerja adalah ukuran tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi dan seberapa baik kinerjanya.

Menurut Maher (1997:686) pengukuran kinerja didasarkan atas dua konsep, yaitu:

1. *it fokus all organization members on the organization's objectives and reflect how individual or unit contribute ti them.*



1. *It design to reflect each organization level ability to affect result or what is controllabel at that level.*

Atkinson, et al (1997:54) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai berikut: *“performance measurement is the activity of measuring the performance of an activity or the entire value chain.”*

Dengan adanya pengukuran kinerja tersebut akan membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Menurut Horngren, pengukuran kinerja terdiri atas pengukuran kinerja keuangan dan pengukuran kinerja non keuangan.

#### 1. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan adalah pengukuran yang menjabarkan indikasi-indikasi kinerja dalam satuan uang atau satuan moneter yang merupakan hasil akhir dari kegiatan dan merupakan keputusan manajemen. Seperti yang dikemukakan oleh Hansen&Mowen (2000:386) bahwa *“financial measure of performance should also provide specific information about the dollar effect of activity performance change.”*

#### 2. Pengukuran Kinerja Non Keuangan

Pengukuran kinerja non keuangan lebih ditekankan pada pengukuran aktivitas secara fisik, yang digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan keterlibatan pekerja. Pengukuran kinerja non keuangan memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Seperti yang dikemukakan oleh Shank & Govindarajan (1993:149), kekuatan tersebut antara lain:

- 1) Pengukuran non keuangan lebih mudah untuk ditelusuri ke strategi organisasi.

- 2) Pengukuran non keuangan lebih *actionable*, yakni memberikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan dengan aktivitas operasional
- 3) Sesuai dengan sistem manufaktur yang *new- high-tecnology*

Sedangkan kelemahan yang dimiliki dari pengukuran kinerja non keuangan adalah:

1. Diperlukan perubahan fungsi pengendalian
2. Kesulitan dalam merubah kedalam jumlah dollar sehingga memerlukan kerangka berpikir teoritis secara keseluruhan.
3. Adanya kesulitan yang mengikat antara pengukuran keuangan dan non keuangan sehingga dapat terjadi konflik dalam kurun waktu yang pendek.

Ukuran kinerja non keuangan meskipun mempunyai beberapa kelemahan, tetapi dalam penggunaannya diperlukan karena ukuran tersebut bersifat melengkapi ukuran kinerja keuangan dalam mengukur kinerja organisasi secara keseluruhan.



## BAB III METODE PENELITIAN

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (1998:3) pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Proses dalam penelitian ini memperhatikan pada konteks studi yang menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti.

Analisis dan interpretasi akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman dalam mengevaluasi penerapan terhadap anggaran kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Dengan demikian penelitian akan diawali dari fakta kemudian dilakukan observasi untuk menghasilkan simpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap sebuah instansi pemerintah yang menyediakan layanan jasa yang berkaitan dengan bidang perikanan dan kelautan di Jawa Timur, yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur sebagai subjek penelitian.

#### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian lebih terfokus, peneliti melakukan pembatasan terhadap ruang lingkungannya. Pembatasan tersebut yaitu :



1. Subjek penelitian adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur karena pada tahun anggaran 2004, instansi tersebut mulai mengimplementasikan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran.
2. Objek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2003 dan 2004 Dinas Perikanan dan Kelautan.

### **3.3 Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan personil bagian keuangan dan bagian lain di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Data primer yang diperoleh berupa visi, misi, perencanaan strategis, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator dan standar kinerja satuan kerja dan data-data yang lain yang terdapat dalam Renstra unit kerja tahun 2001 sampai 2005.
2. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen berupa anggaran dan realisasinya serta literatur-literatur yang didapatkan dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

### **3.4 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan susunan logis yang berusaha menghubungkan data-data empiris dengan pertanyaan awal penelitian, terutama simpulan-simpulannya. Komponen penting dalam penelitian adalah :

### 1. Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah APBD untuk tahun anggaran 2004 telah disusun sesuai dengan pedoman pelaksanaan Kepmendagri No 29 Tahun 2002.
- b. Apakah APBD tahun anggaran 2004 yang disusun dengan pendekatan kinerja oleh Dinas Perikanan dan Kelautan benar-benar berfungsi dalam mengawasi dan mengendalikan dominasi pemerintah.

### 2. Proposisi

- a. Prosedur perencanaan anggaran
- b. Prosedur penyusunan program dan kegiatan
- c. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja

### 3. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa unit analisis tunggal, yaitu proses penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan penilaian APBD tahun anggaran 2004 dengan standar kinerja yang diharapkan.

### 4. Keterkaitan Logika antara data dan proposisi

Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah harus mengacu pada proposisi yang telah ditetapkan. Peneliti mengkaitkan data di lapangan dengan proposisi, yaitu semua data mengenai unit analisis didiskripsikan sesuai dengan keadaan di lapangan dan data dianalisis berdasarkan dengan kriteria yang ada kemudian hasil temuan tersebut diinterpretasikan.

## 5. Kriteria untuk menginterpretasikan temuan

Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2004 apakah telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

### 3.5 Prosedur pengumpulan data

Yang dijadikan pedoman utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan APBD yang berpedoman pada Kepmendagri No 29 Tahun 2002. Tahapan pengumpulan data meliputi ;

#### 1. Survey pendahuluan

Penulis melakukan kunjungan awal ke Dinas Perikanan dan Kelautan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai situasi dan kondisi terkait dengan penerapan anggaran kinerja.

#### 2. Studi kepustakaan

Berupa kegiatan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan literatur ilmiah yang berisi konsep-konsep dasar dan teori-teori yang berkenaan dengan anggaran kinerja, sehingga bisa dijadikan landasan teoritis guna menganalisis kondisi yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan khususnya yang berkenaan dengan anggaran dan realisasinya dalam rangka menilai efektifitas pengukuran kinerjanya.

#### 3. Survey lapangan

Merupakan lanjutan dari survey pendahuluan dengan melakukan observasi dan wawancara secara lebih mendalam dan rinci dengan pegawai Dinas.

### **3.6 Metode dan teknik analisis data**

Analisis data dilakukan sejak peneliti melakukan survey pendahuluan sampai dengan survey lapangan. Dari hasil studi pendahuluan, penulis memperoleh gambaran bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mengukur kinerjanya yang menggunakan anggaran diperoleh suatu kepuasan karena dengan anggaran kinerja dapat diketahui kinerja sesungguhnya dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan apabila terdapat ketidakwajaran dapat diketahui penyebabnya, yakni membandingkan anggaran dengan realisasinya dan dihitung prosentase keberhasilannya.

Dari studi kepustakaan, peneliti dapat mengetahui kerangka teoritis tentang penyusunan dan pelaksanaan APBD dengan pendekatan kinerja dan peraturan-peraturan yang mendasarinya.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara data dan informasi yang diperoleh dari hasil survey pendahuluan dan studi lapangan dengan hasil studi kepustakaan. Tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam objek penelitian



## **BAB IV**

# **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pokok Organisasi**

Pembentukan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur sejalan dengan terbentuknya departemen perikanan dan kelautan pada kabinet pembangunan periode 1999 sampai 2004 dan merupakan implementasi pelaksanaan Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang telah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia di wilayah laut khususnya, yaitu 12 mil bagi propinsi dan 4 mil bagi daerah kabupaten/kota.

Selain implementasi dari Undang-undang No.22 tahun 1999, Dinas Perikanan dan Kelautan juga menerapkan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberikan peluang bagi daerah agar dapat mengatur serta melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat dan potensi setiap daerah.

Adapun kewenangan pemerintah propinsi di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan PP No.25 tahun 2000 adalah dalam bidang :

1. Perikanan yang termasuk dalam kelompok pertanian, yaitu :

- a. penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya
- b. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat.
- c. pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.

## 2. Kelautan

- a. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut propinsi
- b. eksploitasi, eksplorai, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan propinsi.
- c. konservasi dan pengelolaan plasma nutfa speifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan propinsi.
- d. pelayanan ijin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan propinsi.

Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur berada di Jalan A.Yani no 152 B Surabaya. Sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 36 Tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000, maka ditetapkan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah propinsi di bidang perikanan dan kelautan.

Tugas pokok dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perikanan dan kelautan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi antara lain :

1. perumusan program di bidang perikanan dan kelautan.
2. penataan, pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah laut kewenangan propinsi.
3. pelayanan izin usaha pembudidayaan dan pengakapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi.
4. penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengembangan perekayasaan teknologi perikanan dan kelautan serta pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan.
5. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

#### **4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan**

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Perikanan dan Kelautan.

2. Wakil Kepala Dinas

Mempunyai tugas mewakili kepala dinas apabila berhalangan, melakukan pengawasan intern dinas, melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Kepala Bagian Tata Usaha



Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan dan perlengkapan. Bagian tata usaha terdiri dari a) sub bagian umum; b) sub bagian keuangan; c) sub bagian perlengkapan.

#### 4. Sub Dinas Penyusunan Program

Mempunyai tugas menyusun dan merencanakan program, melakukan evaluasi dan pembuatan laporan. Sub dinas penyusunan program terdiri dari a) seksi perencanaan; b) seksi pengolahan data; c) seksi evaluasi dan pengendalian; d) seksi tata laksana dan hukum.

#### 5. Sub Dinas Budidaya dan Pembenihan Perikanan

Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan budidaya dan pembenihan perikanan. Sub dinas budidaya dan pembenihan perikanan terdiri dari a) seksi perekayasaan teknologi budidaya; b) seksi perekayasaan teknologi pembenihan; c) seksi pengendalian lingkungan dan penyakit ikan d) seksi sarana produksi.

#### 6. Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengembangan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan. Sub dinas pengelolaan sumber daya kelautan terdiri dari a) seksi eksplorasi sumber daya kelautan; b) seksi eksploitasi dan teknologi kelautan; c) seksi pengembangan jasa sumber daya kelautan; d) seksi konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan.

#### 7. Sub Dinas Prasarana Kelautan dan Perikanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana perikanan dan kelautan. Sub dinas prasarana kelautan dan perikanan terdiri dari a) seksi prasarana pengolahan; b) seksi prasarana penangkap; c) seksi prasarana budidaya; d) seksi tata operasional pelabuhan perikanan.

#### 8. Sub Dinas Usaha Perikanan

Mempunyai tugas fasilitas, bimbingan, pengawasan dan pengembangan usaha perikanan dan kelautan. Sub dinas usaha perikanan terdiri dari a) seksi perizinan usaha perikanan; b) seksi pengembangan pemasaran; c) seksi pengembangan mutu dan pengolahan hasil perikanan; d) seksi investasi dan permodalan usaha.

#### 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Mempunyai fungsi pelayanan di bidang perikanan dan kelautan.

## 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan pada Dinas dengan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan terhadap data-data Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
2. Mengamati fasilitas yang ada dalam Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana operasi pencapaian tujuannya.
3. Mempelajari dokumentasi yang relevan, seperti peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur, standar dan pengendalian kualitas, serta job deskription.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1). Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan

Visi merupakan pernyataan yang menjadi tumpuan bagi misi, nilai dan tujuan sehingga terjadi sinergi yang mendorong alokasi sumber daya organisasi secara optimal dan menjadi pilihan utama dari berbagai gambaran tentang kondisi ideal masa depan yang dianggap paling mungkin dapat diwujudkan oleh organisasi.

Visi Dinas perikanan dan kelautan yang ingin diwujudkan adalah “pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.”

Sedangkan misi merupakan pernyataan yang mengandung makna pada eksistensi organisasi dan kepedulian organisasi kepada kepentingan pelanggan (mitra kerja) dan harus menggambarkan segala sesuatu untuk mencapai visi. Adapun misi yang diemban oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur adalah :

1. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan dan pembudidayaan ikan.
2. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
3. Mengembangkan prasarana, teknologi dan informasi perikanan dan kelautan.

4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, tertib dan aman bagi masyarakat serta dunia usaha.
  5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perikanan dan kelautan.
  6. Mewujudkan sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2). Tujuan Organisasi.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan, maka dirumuskan atau diformulasikan tujuan pembangunan perikanan dan kelautan sebagai berikut :

1. memanfaatkan sumber daya perikanan.
2. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan devisa negara dari hasil perikanan dan kelautan.
3. meningkatkan produktivitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perikanan dan kelautan.
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, penyediaan bahan baku dan pemenuhan gizi masyarakat dari hasil perikanan.
5. meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha serta peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan dan kelautan.
6. menurunkan tingkat pelanggaran pemanfaatan dan perusakan sumber daya perikanan dan kelautan
7. menurunkan tingkat konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya perikanan dan kelautan.
8. menyediakan prasarana, teknologi, data dan informasi perikanan dan kelautan.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pra Penyusunan APBD tahun 2004**

Sebelum menyusun APBD, terlebih dahulu menentukan arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi dan prioritas APBD. Selain itu strategi dan prioritas, APBD juga memperhatikan kondisi keuangan daerah dengan dibatasi oleh kerangka dan kebijakan umum dan pencapaian standar kinerja.

Sasaran yang hendak dicapai harus ditentukan sesuai dengan target yang diinginkan, karena pembangunan perikanan di Jawa Timur merupakan bagian integral dari pembangunan regional Jawa Timur dan secara konseptual direncanakan dan disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional, dengan memperhatikan potensi, kondisi dan prioritas daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara teratur yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran kualitatif dari Dinas Perikanan dan Kelautan adalah :

1. dibentuknya beberapa wilayah pengelolaan dan pengembangan perikanan dan kelautan.
2. menurunnya jumlah masyarakat miskin di wilayah pesisir serta menurunnya tingkat pelanggaran pemanfaatan dan kerusakan sumber daya perikanan dan kelautan dan menurunnya tingkat konflik sosial antar masyarakat nelayan.
3. dihasilkannya beberapa jenis teknologi perikanan dan kelautan.
4. dijalinnya kerjasama di bidang perikanan dengan beberapa lembaga dan antar daerah.

5. tersedianya data dan informasi perikanan dan kelautan tersedia sepanjang tahun secara akurat.
6. berkembangnya prasarana perikanan dan kelautan sesuai tingkat perkembangan usaha perikanan dan kelautan serta berkembangnya jaringan usaha dan kemitraan perikanan dan kelautan.
7. dikaji ulang terhadap peraturan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.
8. meningkatkan produksi dan produktivitas usaha dalam rangka penguatan modal dan regulasi usaha.

Selain sasaran kualitatif Dinas Perikanan dan Kelautan juga memiliki sasaran kuantitatif yang merupakan target prosentase yang akan dicapai, diantaranya :

1. peningkatan produksi penangkapan ikan sebesar 4,7 % dengan asumsi pemanfaatan sumber daya ikan secara rasional, peningkatan sarana dan prasarana penangkapan, pengembangan teknologi penangkapan, akses lembaga dan perbankan, serta peningkatan masyarakat nelayan.
2. peningkatan produksi budidaya sebesar 5,3% dengan asumsi penataan tata ruang dan kawasan usaha budidaya, penyediaan agroinput yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, pemberantasan hama penyakit, penerapan sistem keamanan, serta peningkatan kapasitas masyarakat pembudidaya ikan.
3. peningkatan ekspor hasil perikanan dan kelautan sebesar 15% dengan asumsi bahwa tersedia iklim yang kondusif, dukungan informasi pasar, dan tersedianya fasilitas ekspor serta dukungan dari lembaga keuangan dan perbankan.

4. peningkatan konsumsi ikan sebesar 5% dengan asumsi adanya peningkatan produksi perikanan, adanya distribusi pemasaran secara merata, dukungan program diversifikasi dan gizi, serta kemampuan dan daya beli masyarakat meningkat.
5. penyerapan tenaga kerja sebesar 2% dengan asumsi berkembangnya usaha perikanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tersedianya paket teknologi tepat guna, serta perluasan pasar.
6. perkembangan armada perikanan sebesar 3% dengan asumsi tersedianya sumber daya ikan, fasilitas sarana dan prasarna, bahan baku, serta peningkatan permintaan pasar.

Setelah menentukan sasaran yang hendak dicapai, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi dan prioritas. Strategi merupakan rangkaian pemikiran dan operasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya organisasi guna pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun strateginya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.
2. Pemberdayaan dan penguatan sumber daya manusia.
3. Penerapan dan pengembangna IPTEK dan informasi
4. Penguatan permodalan usaha perikanan.
5. Penataan dan penguatan institusional

Prioritas kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur antara lain :

1. pemantapan dan pengembangan kelembagaan
2. pengelolaan dan pengendalian SDI yang berkelanjutan

3. peningkatan pelayanan dalam rangka pemberdayaan komunitas perikanan dan kelautan.
4. Penataan sistem dan penegakan hukum.
5. Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka pengembangan IPTEK
6. Pengembangan jaringan informasi, pemasaran dan prasarana.

Di dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur yang mencerminkan perwujudan visi dan misi yang harus dicapai di masa yang akan datang diperlukan penguasaan informasi tentang masalah-masalah dalam lingkungan internal dan eksternal melalui suatu analisis yang menyimpulkan asumsi organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan dapat diidentifikasi dan dianalisa lingkungan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur yang dihadapi saat ini. Adapun lingkungan internal meliputi :

1. Kekuatan (*Strength*)
  - a. Tersedianya struktur organisasi Dinas yang memadai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mampu mengimbangi tuntutan pembangunan dalam mencapai sasaran.
  - b. Dukungan anggaran yang memadai
  - c. Dukungan atasan cukup tinggi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - d. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah



Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.

e. Tersedianya prasarana dan sarana.

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum terpenuhinya dimensi kualitas sumber daya manusia.
- b. Lemahnya persiapan KISS dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap peraturan perundangan di bidang perikanan dan kelautan
- d. Terbatasnya data informasi.

Sedangkan lingkungan eksternal yang dihadapi Dinas Perikanan dan Kelautan diantaranya :

## 1. Peluang (*Opportunities*)

- a. tersedianya potensi sumber daya perikanan
- b. permintaan pasar meningkat
- c. kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut
- d. kerja sama antar daerah dan luar negeri
- e. keberadaan lembaga penelitian, perguruan tinggi, keuangan dan perbankan
- f. tersedianya prasarana dan sarana yang mendukung
- g. ekonomi kerakyatan

## 2. Ancaman (*Threats*)

- a. Persyaratan pasar bebas, yang memuat multidimensi atribut pasar yang harus dipenuhi oleh pemasok komoditas sehingga bagi pemasok yang belum siap memenuhi persyaratan tersebut merupakan ancaman, disisi lain bagi negara yang sudah siap menghadapi kriteria tersebut merupakan peluang.
- b. Tingkat produktivitas sumber daya manusia merupakan suatu ancaman bagi negara yang kualitas tenaga kerjanya berada dibawah standar karena salah satu persyaratan kelangsungan usaha adalah efisiensi.
- c. Sistem pelayan publik yang belum prima akan berdampak kepada tingkat efisiensi usaha sehingga merupakan ancaman dalam dunia yang membutuhkan keunggulan komperatif maupun kompetitif.
- d. Salah satu persyaratan yang utama dalam menciptakan dan mengembangkan usaha adalah ketertiban dan keamanan, sehingga situasi dan kondisi nelayan saat ini secara faktual merupakan ancaman bagi pengembangan maupun kelangsungan usaha perikanan.

Untuk menghadapi berbagai ancaman dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang muncul akibat adanya kelemahan, maka faktor kunci keberhasilan yang digunakan antara lain :

1. pemantapan organisasi
2. pengelolaan dan pengendalian SDI yang berkelanjutan
3. peningkatan pelayanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan/pembudidaya ikan

4. peningkatan KISS dan kerjasama luar negeri, antar daerah, lembaga keuangan dan perbankan
5. pengembangan jaringan informasi dan statistik perikanan dan kelautan
6. penegakan hukum dan sistem tata hukum
7. pengembangan jaringan pemasaran dan sarana
8. menetapkan jaringan kerja sama antar UPT, LITBANG dan Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan IPTEK
9. mewujudkan stabilitas keamanan dalam kerangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **4.3.2 Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun 2004**

Program dan kegiatan kerja Dinas Perikanan dan Kelautan disesuaikan dengan ruang lingkup sasaran dan penanganannya. Program pembangunan perikanan dan kelautan sendiri dilaksanakan melalui 4 program yaitu :

1. program ketahanan pangan  
tujuan dari program ini adalah meningkatkan ketersediaan komoditas pangan dalam jumlah cukup, kualitas memadai melalui peningkatan produktivitas dan produksi perikanan. Sedangkan sasarannya adalah meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi komoditas unggulan perikanan serta terpeliharanya sistem sumber daya alam dan lingkungan.
2. program pengembangan agribisnis  
bertujuan untuk mengembangkan usaha pertanian dengan wawasan bisnis, menghasilkan nilai tambah, dan pengembangan ekonomi wilayah. Sasarannya

adalah meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan, meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat perikanan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.

3. program pengembangan pertanian rakyat terpadu

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha tani. Sasaran yang ingin dituju adalah pengembangan pertanian rakyat, optimalisasi sumber daya perikanan dengan kualitas tinggi serta pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.

4. program pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan

tujuannya adalah

- a. mengembangkan serta memberdayakan masyarakat kepulauan dan wilayah pesisir dan meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir seperti hutan bakau, terumbu karang, padang lamun (hutan rumput liar); estuaria (pertemuan antara air tawar dengan air laut) dalam rangka melestarikan plasma nutfah, penyediaan bahan baku, perlindungan lingkungan hidup dan jasa pariwisata.
- b. meningkatkan pengamanan dan pengawasan dalam rangka pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan serta melakukan penataan dan pengembangan pengairan, sumber daya pesisir dan lautan serta pulau-pulau kecil.
- c. meningkatkan efisiensi dan produktivitas potensi pesisir dan lautan melalui keterpaduan pengelolaan secara adil, berimbang dan berkelanjutan

dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan sasaran dari program adalah :

- a tercipta peningkatan pendapatan masyarakat dan nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tercipta peningkatan nilai real sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b tercipta peningkatan peranan produk, jasa maritim dan kelautan dan pemantapan status kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir, seperti hutan bakau, terumbu karang, padang lamun dan estuaria.
- c tercipta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan secara berkelanjutan.
- d tercipta peningkatan peran kawasan lindung dan kawasan konservasi laut dalam pengembangan perekonomian masyarakat wilayah pesisir dan kelautan.
- e terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang efisien dan berkelanjutan.
- f terintegrasikan pembangunan daratan, pesisir dan lautan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah.
- g terwujud peningkatan pemanfaatan wilayah kepulauan, terumbu karang dan potensi sumber daya kelautan bagi masyarakat secara optimal dan

berkelanjutan serta terwujud peningkatan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan.

Berdasarkan gambaran umum perikanan Jawa Timur dan analisis strategi potensi perikanan dan kelautan di Jawa Timur tentang perkembangan produksi ikan, ekspor komoditi perikanan, perkembangan konsumsi ikan, jumlah tenaga kerja, perkembangan armada dan pendapatan nelayan atau petani ikan tahun 2001 sampai tahun 2005 dapat ditargetkan.

Kegiatan atau program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur periode 2001 sampai 2005 diantaranya :

1. pemantapan dan pengembangan kelembagaan.
2. pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan yang berkelanjutan.
3. peningkatan pelayanan guna pemberdayaan dan pengembangan usaha komunitas perikanan dan kelautan.
4. penataan sistem dan penegakan hukum.
5. pemberdayaan UPT dalam rangka IPTEK.
6. pengembangan jaringan informasi, pemasaran dan prasarana.

Selain berbagai kegiatan diatas, masih ada kegiatan lain sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Berikut kegiatan pokok yang dilakukan oleh berbagai program yang disusun Dinas Perikanan dan Kelautan.

1. Program ketahanan pangan, kegiatan pokok yang dilakukan diantaranya pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit di bidang perikanan lintas kabupaten/kota, pengaturan penggunaan benih unggul di bidang perikanan, penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan

- kesepakatan dengan kabupaten/kota, pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang perikanan lintas kabupaten/kota, penyediaan dukungan pengendalian hama dan penyakit di bidang perikanan, pengaturan penggunaan air dan irigasi, pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang perikanan .
2. Program pengembangan agribisnis, kegiatan pokoknya adalah penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota, penetapan standar pembibitan atau perbenihan perikanan, promosi ekspor komoditas perikanan unggulan daerah propinsi, serta penyediaan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang perikanan
  3. Program pengembangan pertanian rakyat terpadu, kegiatan pokoknya adalah pengembangan kapasitas kelembagaan pangan yang berfungsi menjaga distribusi dan stabilitas harga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat perikanan teknis fungsional, ketrampilan dan kejuruan tingkat menengah, pemberdayaan petani dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi perikanan, peningkatan akses masyarakat perikanan terhadap sumber-sumber keuangan, lembaga keuangan bank, non bank dan pasar, peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat petani, perbaikan posisi tawar petani melalui pemberdayaan kelembagaan petani.
  4. Program pengembangan pengelolaan sumberdaya kelautan, kegiatan pokoknya antara lain penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut propinsi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, reklamasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan propinsi, konservasi dan



pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan propinsi, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi.

#### 4.3.3 Pelaporan APBD

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menurut aturan pelaksanaannya dan berpedoman pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, bahwa anggaran yang disusun terutama dalam instansi pemerintah menggunakan anggaran dengan pendekatan kinerja. Dengan pendekatan kinerja ini diharapkan tujuan dan sasaran program serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Menurut pendekatan anggaran kinerja dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal.

Sebagai salah satu bagian dari instansi pemerintah yang taat sesuai aturan dan prosedur, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur juga telah menerapkan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja. Struktur anggaran yang dibuat Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dengan pendekatan kinerja dapat terlihat dalam tabel 4.1.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah anggaran pada tahun 2004 yang ditargetkan sebesar Rp.32.656.490.000,00 dan realisasi yang dikeluarkan sebesar



Rp.31.785.799.316,00. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.870.690.684,00. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan seefisien dan seefektif mungkin dikeluarkan untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan, sehingga dari selisih tersebut juga dapat dilihat bahwa kinerja dari Dinas Perikanan dan Kelautan telah mencapai hasil yang baik.

Berbeda dengan sistem anggaran yang dibuat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan tahun anggaran 2003 yang menggunakan sistem anggaran tradisional, (lampiran 1) meskipun menurut perundang-undangan anggaran kinerja digunakan sejak ditetapkannya Kepmendagri, tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan dan Kelautan baru menerapkan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja pada tahun 2004.

Dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan menterjemahkan program-programnya sesuai dengan tanggung jawab setiap kepala bagian dalam melaksanakan program atau bagian program tersebut. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran memerlukan suatu kerja sama dari berbagai jenjang organisasi. Penyusunan anggaran Dinas melakukan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Tabel 4.1  
Struktur APBD Dinas Perikanan dan Kelautan  
Propinsi Jawa Timur

No	URAIAN	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 5.000.000.000	Rp. 6.906.002.000	Rp(1.906.002.000)
1.1.1	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	Rp 650.000.000	Rp 497.277.000	Rp 152.723.000
1.1.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 4.350.000.000	Rp 6.408.725.000	Rp (2.058.725.000)
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>Rp 32.656.490.000</b>	<b>Rp 31.785.799.361</b>	<b>Rp 870.690.639</b>
2.1	<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>Rp 22.972.546.250</b>	<b>Rp 22.129.456.415</b>	<b>Rp 843.089.835</b>
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	Rp 11.599.583.400	Rp 10.834.640.969	Rp 764.942.431
2.1.2	Belanja operasi dan pemeliharaan	Rp 6.083.223.600	Rp 6.044.125.151	Rp 39.098.449
2.1.3	Belanja modal	Rp 5.289.739.250	Rp 5.250.690.295	Rp 39.048.955
2.2	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Rp 9.683.943.750</b>	<b>Rp 9.443.952.900</b>	<b>Rp 239.990.850</b>
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	-	-	-
2.2.2	Belanja operasi dan pemeliharaan	Rp 1.958.355.000	Rp 1.734.867.300	Rp 31.987.700
2.2.3	Belanja modal	Rp 7.725.588.750	Rp 7.709.085.600	Rp 16.503.150
	<b>SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN</b>	<b>Rp(27.656.490.000)</b>	<b>Rp(24.879.797.361)</b>	<b>Rp(2.776.692.639)</b>

#### 4.3.4 Pengawasan dan Pengendalian

Pada Dinas Perikanan dan Kelautan pengendalian yang dilaksanakan berupa pengendalian preventif dengan membandingkan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya yang seharusnya terjadi (yang dianggarkan).

Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.110 tahun 1991 pasal 2 maka yang melaksanakan pengawasan internal pengelolaan dan pelaksanaan APBD adalah BAWASDA. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BAWASDA mencakup seluruh aspek keuangan

daerah, termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program dan kegiatan serta manajemen keuangan pemerintah daerah.

Evaluasi atas hasil pengukuran kinerja berdasarkan serapan anggaran disesuaikan untuk tiap-tiap program dan juga untuk melihat jumlah anggaran yang diserap oleh Dinas Perikanan dan Kelautan untuk berbagai belanja-belanja selama tahun 2003 dan tahun 2004. Pada tabel 4.1 terlihat bahwa tingkat penyerapan anggaran seluruhnya mencapai 52,64 %.

Apabila pengukuran kinerja hanya didasarkan atas tingkat penyerapan anggaran semacam ini, dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan untuk tahun 2004 sangat bagus, karena terlihat bahwa tingkat penyerapan anggaran semuanya 47,36 %. Hal ini bisa menimbulkan kerancuan, karena belum tentu dari dana yang diserap proyek atau kegiatan yang dikerjakan benar-benar berhasil karena yang diukur hanya pengeluaran dan yang dianggarkan saja. Pengukuran kinerja dengan hanya mengandalkan tingkat penyerapan anggaran sangat tidak tepat, karena kegiatan atau program yang sebenarnya harus dilakukan susah untuk terukur, jadi diperlukan audit operasional yang benar-benar mengukur tingkat pencapaian kinerja masing-masing program atau kegiatan.

#### **4.4 Tolok Ukur Kinerja Berdasarkan Kepmendagri No.29 Tahun 2002**

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran, sehingga sistem anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja akan mengutamakan pada

pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

: Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, standar biaya dan plafon anggaran.

#### 1. Standar analisis biaya

merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam menyusun APBD dengan pendekatan kinerja, yaitu standar belanja dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan berdasarkan jumlah anggaran belanja setiap program atau kegiatan.

#### 2. Tolok ukur kinerja

merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Tolok ukur kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada

bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Dalam mengembangkan indikator keberhasilan kriteria berikut dapat digunakan oleh pemerintah daerah yaitu :

- a. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran unit kerja, program atau kegiatan.
- b. Mudah dipahami, dapat dikomunikasikan dengan jelas
- c. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan
- d. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan kinerja dari program atau kegiatan sejenis.
- e. Andal, dapat diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat diverifikasi.

### 3. Standar biaya

adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Pene-apan standar biaya membantu penyusunan belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah tersebut. Perkembangan standar biaya harus dilakukan terus menerus sejalan dengan perubahan harga yang berlaku. Penetapan standar biaya pada setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah.

### 4. Plafon Anggaran

merupakan batasan anggaran tertinggi yang dapat diberikan atas suatu kegiatan atau unit fungsional. Perkiraan plafon anggaran diajukan untuk

menghasilkan alokasi dana yang akurat, adil dan mampu memberikan intensif bagi setiap unit kerja untuk melakukan prinsip *value of money* dalam melakukan pengeluaran daerah.

Sebagai salah satu dari organisasi pemerintah daerah, yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum sering disalahkan berbeda oleh sebagian masyarakat yang memberi kesan adanya suatu proses yang panjang, yang berbelit-belit, lamban, lambat serta formalitas apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan kepada organisasi tersebut sehingga kinerja dari Dinas sebagai pelaksana organisasi pemerintah daerah tersebut dipandang sebagai penghambat. Untuk memperbaiki anggapan tersebut Dinas telah mengantisipasi akan kebutuhan pelayanan tersebut :

- a. Sifat pendekatan tugas, lebih mengarah kepada pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Penyempurnaan organisasi, efisiensi, efektif dan profesional.
- c. Sistem dan prosedur kerja yang cepat, tepat dan akurat.

#### **4.5 Indikator kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*) maupun tahap setelah kegiatan selesai berfungsi (*ex-poste*)

Dalam analisis kinerja, penilaian organisasi penting. Dari analisis, pernyataan dapat dibuat atas keinginan tingkat kinerja dan target dapat dibuat. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun dan menetapkan indikator kinerja dalam kaitannya dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Susun dan tetapkan rencana strategis lebih dahulu yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan atau sasaran termasuk kebijaksanaan, program dan kegiatan.
2. Identifikasi data atau informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja. Dalam hal ini data atau informasi yang relevan, lengkap, akurat dan kemampuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.
3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan atau program atau kegiatan.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi, yaitu :

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan atau peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.



3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif atau negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Uraian tentang indikator kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur terdapat dalam lampiran 2. Berdasarkan indikator yang telah dibuat tersebut, apabila kegiatan telah ditentukan dan ditetapkan untuk mencapai target atau sasaran telah memberikan manfaat dan pengaruh yang positif bagi masyarakat itu sendiri dengan berbagai asumsi untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang ingin dicapai, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan seefektif mungkin, dan apabila anggaran yang terrealisasi tidak melebihi dari target anggaran, maka dapat dikatakan bahwa anggaran telah digunakan seefisien mungkin.

Untuk membuktikan bahwa indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang ditetapkan berikut beberapa indikator kinerja dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur:

1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah evaluasi pemanfaatan kinerja sumber daya manusia perikanan dan target yang diharapkan adalah tercapainya sumber daya manusia yang terampil, salah satunya peningkatan produksi penangkapan ikan sebesar 4,7 %, untuk mencapai target tersebut maka yang



dibutuhkan diantaranya adalah dana untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara rasional, sarana dan prasarana penangkapan yang mendukung, sehingga akan dihasilkan suatu laporan tingkat kemajuan sumber daya manusia yang akan membawa efek secara langsung yaitu tenaga perikanan akan semakin terampil serta bermanfaat dalam pengembangan teknologi penangkapan dan mempunyai motivasi yang tinggi, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembangunan perikanan dan kelautan sasaran yang ditetapkan.

2. Melaksanakan kegiatan pengkajian tingkat pendapatan untuk mencapai pendapatan sesuai dengan standar, seperti halnya meningkatkan hasil ekspor perikanan dan kelautan sebesar 15 % dengan asumsi adanya dukungan informasi pasar dan tersedianya fasilitas ekspor serta dukungan dari lembaga keuangan dan perbankan, maka yang dibutuhkan adalah profesionalisme dari sumber daya manusianya, sehingga dihasilkan suatu pendapatan sesuai dengan upah minimum regional (UMR) dan secara langsung pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara optimal.
3. Mengelola sumber daya pesisir. Target yang hendak dicapai adalah keterpaduan pengelolaan sumber daya pesisir dengan cara mengembangkan serta memberdayakan masyarakat kepulauan dan wilayah pesisir serta meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir. Keterpaduan akan terjadi apabila antara stakeholder dan masyarakat terjalin dengan baik dalam memanfaatkan potensi pasar. Untuk mengelola sumber daya pesisir diperlukan dukungan dana, tenaga kerja dan sarana kerja, hal ini terlihat dari berkembangnya armada perikanan sebesar 3%. Keterpaduan antara

stakeholder dan masyarakat pesisir secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sehingga fungsi dan pemanfaatan ruang pesisir secara optimal dan berkesinambungan akan terjamin serta konflik pemanfaatan sumber daya yang dapat merusak ekosistem dapat terhindar.

4. Melaksanakan program atau kegiatan yang mengacu pada program nasional, daerah dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Pelaksanaan kegiatan 80% sesuai program pembangunan perikanan dan kelautan merupakan target yang harus dicapai. Kegiatan yang paling sederhana dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan adalah menaungi atau memberikan binaan kepada usahawan kecil yang bergerak di bidang perikanan, hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan kegiatan masyarakat perikanan. Dari kegiatan ini maka sasaran tujuan jangka pendek/menengah Dinas Perikanan dan Kelautan telah tercapai dan pada akhirnya dibuatlah laporan program tahunan.

Masih banyak lagi indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, dua indikator kinerja diatas hanyalah salah satu penjelasan dari indikator-indikator yang lain. Lebih jelasnya mengenai kegiatan, target, masukan, keluaran, hingga manfaat yang akan diperoleh terdapat dalam lampiran 2.

Sistem anggaran dengan pendekatan kinerja tidak berpikir bagaimana membelanjakan dana yang tersedia dalam anggaran, tetapi bagaimana membelanjakan anggaran yang terbatas seefisien mungkin dan memanfaatkan apa yang diperoleh dari hasilnya, sehingga dengan pendekatan ini akan mengubah pola pembiayaan secara lebih efisien dalam mengukur kinerja.



## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur tahun 2004 adalah pertama kali digunakan pendekatan kinerja sesuai dengan Kepmendagri No.29 tahun 2002 sebagai pedoman pelaksanaannya dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur juga telah sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam pencapaian target, namun masih perlu adanya perbaikan yang lebih baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tindak lanjut kegiatan.

Sistem penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja dinilai efektif oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, karena dengan pendekatan ini semua fungsi operasional yang tidak begitu penting dilebur menjadi satu bagian. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran di Dinas, sehingga untuk menunjang pendekatan itu sendiri, dinas telah mempunyai dasar perencanaan dan strategi untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana strategi Dinas, hal ini juga dapat menjadi salah satu tolok ukur pencapaian anggaran.

## 5.2 Saran

Arahan yang diberikan oleh Kepmendagri tentang penatausahaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara berkesinambungan memang cukup baik tetapi dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh Peraturan Daerah atau keputusan Kepala Daerah. Semua pihak yang terkait dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan penilaian APBD harus benar-benar memahami maksud dan tujuan dari APBD dengan pendekatan kinerja sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk menilai akuntabilitas dari pemerintah, pengukuran kinerja sebaiknya tidak dijadikan sebagai satu-satunya alat karena dalam laporan dengan pendekatan kinerja tidak dijelaskan tentang alasan mengapa pemerintah hanya mencapai faktor-faktor lain dalam pencapaian kinerja tersebut, sehingga Dinas tersebut harus mampu meningkatkan sumber daya manusia yang tersedia sesuai dengan fungsi bagian yang dipertanggungjawabkan.

Meleburnya bagian-bagian operasional dari Dinas membawa dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kondisi keuangan khususnya lebih terkendali, sedangkan dampak negatifnya adalah banyak pegawai-pegawai yang bebas melakukan aktivitas diluar kegiatan atau program atau tugas yang seharusnya dilakukan.

Dengan adanya sistem anggaran dengan pendekatan kinerja diharapkan dapat memperbaiki berbagai kekurangan yang ada dalam instansi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anthony, Robert N. and Vijay Govindarajan. 1999. *Management Control System*. Ninth Edition. Chicago: Richard D. Irwin, Inc.
- Arif, Bachtiar, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Atkinson, Anthony A., Rajiv D. Banker, Robert S Kaplan, dan S. Mark Young. 1997. Second Edition. *Management Accounting*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, Don R dan Maryanne M Mowen. 2003. *Management Accounting*. Sixth Edition. Cincinnati, Ohio: South Western Publishing, Co.
- Horngren, Charles T., George Foster, dan Srikant M. Datar. 2000. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Pemerintah Indonesia No. 25 Tahun 2000: Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Indonesia No. 105 Tahun 2000: Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Supriyono, SU.,R.A, Drs.,Akt. 1989. *Akuntansi Biaya: Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.



LAMPIRAN



**PERHITUNGAN ANGGARAN KINERJA  
SATUAN KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2004**

Bidang Pemerintahan : (03) Bidang Perikanan dan Kelautan  
Satuan Kerja : (0100) Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur

KODE REKENING					URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI		JUMLAH 6 (4+5)	LEBIH/KURANG 7 (3-6)
							BT 4	SPJ PK 5		
1					2	3	4	5	(4+5)	(3-6)
					BELANJA	Rp 32.656.430.000				
					1 BELANJA APARATUR DAERAH	Rp 22.972.486.250				
					1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM	Rp 11.599.523.400			Rp 10.834.640.969	Rp 764.942.431
2	03	0100	1	1	1 Belanja Pegawai/Personalia	Rp 7.745.935.000	Rp 7.003.636.664	Rp 112.840.000	Rp 7.116.476.664	Rp 629.458.336
2	04	0100	1	2	1 Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.059.801.200	Rp 1.767.306.775	Rp 1.157.689.830	Rp 2.924.996.605	Rp 134.864.595
2	05	0100	1	3	1 Belanja Perjalanan Dinas	Rp 336.180.000	-	Rp 336.180.000	Rp 336.180.000	-
2	06	0100	1	4	1 Belanja Pemeliharaan	Rp 457.607.200	Rp 152.745.500	Rp 304.242.200	Rp 456.987.700	Rp 619.500
					1 BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	Rp 6.083.223.600			Rp 6.044.125.151	Rp 39.098.449
2	03	0100	2	1	1 Belanja Pegawai/Personalia	Rp 1.638.070.000	Rp 365.140.000	Rp 1.272.480.000	Rp 1.637.620.000	Rp 450.000
2	03	0100	2	2	1 Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.110.873.350	Rp 1.032.967.500	Rp 2.041.921.501	Rp 3.074.889.001	Rp 35.984.349
2	03	0100	2	3	1 Belanja Perjalanan Dinas	Rp 644.940.000	-	Rp 642.308.400	Rp 642.308.400	Rp 2.631.600
2	03	0100	2	4	1 Belanja Pemeliharaan	Rp 689.340.250	Rp 39.995.500	Rp 649.312.250	Rp 689.307.750	Rp 32.500
2	03	0100	3	1	BELANJA MODAL	Rp 5.289.739.250	Rp 5.031.451.145	Rp 219.239.150	Rp 5.250.690.295	Rp 39.048.955
					BELANJA PUBLIK	Rp 9.683.943.750				
					2 BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	Rp 1.958.355.000				
2	03	0100	2	1	2 Belanja Pegawai/Personalia	Rp 191.510.000	-	Rp 191.500.000	-	Rp 10.000
2	03	0100	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.439.495.000	Rp 394.745.000	Rp 1.043.072.300	Rp 1.407.817.300	Rp 31.677.700
2	03	0100	2	3	2 Belanja Perjalanan Dinas	Rp 252.350.000	-	Rp 252.350.000	Rp 252.350.000	-
2	03	0100	2	4	2 Belanja Pemeliharaan	Rp 75.000.000	Rp 74.700.000	-	Rp 74.700.000	Rp 300.000
2	03	0100	3	2	BELANJA MODAL	Rp 7.725.588.750	Rp 7.338.681.600	Rp 370.404.000	Rp 7.709.085.600	Rp 16.503.150

**STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2003**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SELISIH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 4.050.000.000	Rp 5.706.503.585	Rp 1.206.503.585
	a. Ret. Pemakaian Kekayaan daerah	Rp 4.050.000.000	Rp 5.239.899.185	Rp 1.189.899.185
	b. Ret. Pen. Prod. Usaha Daerah	Rp 450.000.000	Rp 466.604.400	Rp 16.604.400
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
	Belanja Pegawai	Rp 6.771.941.000	Rp 6.686.004.731	Rp 85.936.269
	Belanja Barang	Rp 5.056.840.000	Rp 5.052.764.487	Rp 4.075.513
	Belanja Pemeliharaan	Rp 531.800.000	Rp 531.317.400	Rp 482.600
	Belanja Perjalanan	Rp 108.390.000	Rp 108.390.000	-
	Belanja Lain-lain	Rp 360.700.000	Rp 360.700.000	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 12.829.671.000</b>	<b>Rp 12.739.176.618</b>	<b>Rp 90.494.382</b>

No	KEGIATAN	TARGET	INDIKATOR KINERJA					ASUMSI
			INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT	
1	Pelaksanaan pemanfaatan program	Pelaksanaan kegiatan 80% sesuai program pembangunan perikanan dan kelautan	Dana, tenaga, indikator keberhasilan program:	Laporan program tahunan	Mencerminkan hasil pelaksanaan program pembangunan perikanan & kelautan jangka pendek	Pencapaian sasaran tujuan jangka pendek/menengah	Peningkatan pendapatan dan kegiatan masyarakat perikanan	Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program nasional, daerah & dinas perikanan dan kelautan
2	Evaluasi pemanfaatan kinerja SDM perikanan	SDM yang terampil	Dana, tenaga, sarana kerja	Laporan tingkat kemajuan SDM	Tenaga perikanan yang terampil	Mudah menyerap IPTEK	Mendukung pembangunan perikanan & kelautan mencapai target & sasaran	Tingkat pendidikan SDM mempunyai motivasi yang tinggi
3	Evaluasi pemanfaatan alat peraga	Mengetahui efektifitas penggunaan alat peraga	Dukungan dana tenaga dan sarana kerja	Alat peraga mudah dipahami & mudah dioperasikan nelayan	Kelestarian sumber daya ikan terjamin	Terjaminnya pemasaran & meningkatkan pendapatan	Ekosistem sumber daya perikanan terproteksi	Efektifitas teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan
4	Penerapan pengelolaan sumber daya pesisir	Keterpaduan pengelolaan sumberdaya pesisir	Dukungan dana, tenaga dan sarana kerja	Terjaminnya fungsi & pemanfaatan ruang pesisir secara optimal & berkelanjutan	Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir	Terhindarnya konflik pemanfaatan sumber daya yang dapat merusak ekosistem	Kelestarian sumber daya dan ekosistem	Keterpaduan stakeholder untuk memanfaatkan potensi pasar
5	Monitoring & evaluasi pengelolaan usaha perikanan & kelautan	Terjaminnya kelestarian sumber daya perikanan & kelautan	Dukungan dana, tenaga dan sarana kerja	Memudahkan alokasi usaha perikanan & kelautan	Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat tentang pengelolaan SDI	Efisiensi penggunaan jenis alat tangkap	Sebagai tolok ukur dalam menangani kasus pelanggaran	Partisipasi dari semua pihak khususnya nelayan
6	Evaluasi kinerja PPNS	Mengetahui sejauh mana sistem kinerja PPNS	Dukungan dana, tenaga & sarana kerja	Profesionalisme PPNS dalam membantu penyelesaian kasus pelanggaran	Mengurangi kasus pelanggaran perairan	Menurunnya konflik nelayan	Meningkatnya kemampuan PPNS dalam menguasai teknik pengawasan	Koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait
7	Monitoring & evaluasi potensi perairan umum	Data pengelolaan potensi perairan umum	Dana, tenaga, sarana kerja	Mengetahui tingkat pemanfaatan potensi perairan umum	Data pemanfaatan potensi perairan umum	Pemanfaatan potensi perairan umum secara optimal	Pemanfaatan secara terkendali	Dukungan teknologi, ketersediaan potensi, SDM yang memadai

8	Pelaksanaan Pemanfaatan program	Pelaks. Keg. 80% sesuai program pembangunan perikanan&kelautan	dana,tenaga,indikator keberhasilan program	laporan program tahunan	Mencecminkan hsl pelaksanaan program pembangunan perikanan&kelautan jangka pendek	Pencapaian sasaran tujuan jangka pendek/menengah	peningkatan pendapatan &kegiatan masyarakat perikanan	Keg.yang dilaks mengacu pada prog.nasional, daerah&dinas perikanan&kelautan
9	Pemantauan penataan kerja sama bilateral&multilateral	menyerap ilmu pengetahuan&teknologi	Dana,tenaga,peralatan	Paket teknologi&peningkatan kemampuan	peningkatan kualitas SDM & SDP	Kemampuan SDM meningkat	peningkatan produktivitas&pendapatan	Pelaksanaan kerjasama terjalin baik, tingkat pendidikan SDM
10	Monitoring, evaluasi, penataan sistem&penegakan hkm	Peraturan&perundang-an telah dpt dilaksanakan	dana,tenaga,sarana kerja	Mengukur pemahaman &pelaksanaan penegakan hkm	Pengendalian keamanan	Frek.konflik berkurang	terciptanya situasi aman dan terkendali	tingkat kesadaran masyarakat
11	Sosialisasi penyajian format statistik perikanan&kelautan	penggunaan statistik yang standar	dana,tenaga,sarana kerja	Pemahaman penggunaan format statistik standar	Pemakaian tabel/format yang telah diperbaiki	Pengolahan data yang lebih efektif&efisien	data akurat, tepat waktu	kemampuan SDM, data tersedia
12	pemantapan pelayanan jasa	kepuasan pelayanan pemakai jasa	dukungan dana,SDM dan sarana prasarana	masyarakat terpenuhi kebutuhan pelayanan	pelayanan, tepat, data akurat	komoditas perikanan sesuai keinginan pasar	komoditas perikanan dpt diterima pasar global	produktivitas perikanan lancar
13	Pengkajian tingkat pendapatan	Pendapatan sesuai standar	profesionalisme SDM	Pendapatan sesuai UMR	Pelaksanaan pekerjaan lebih optimal	Kebutuhan SDM cukup terpenuhi	Tercapainya sasaran pembangunan	Tersedia dana alokasi pendapatan
14	Peningkatan sarana kerja	Sarana kerja memadai	Dukungan dana	Jumlah sarana kerja cukup	Produktivitas meningkat	Sasaran program tercapai	Tercapainya sasaran pembangunan	SDM terpenuhi kualitas dan kuantitas
15	Pencapaian target operasional	Target terpenuhi	Dana pengelolaan, pelaksanaan, pengelola	Operasional berjalan lancar	Aset dimanfaatkan dengan baik, memberi nilai (+)	sasaran program tercapai	Sasaran pembangunan tercapai	Adanya sistem pengelolaan yang terprogram
16	Koordinasi kelembagaan	Sinkronisasi kelembagaan	Dana, konsolidasi	Kelembagaan lebih mantap	Kerjasama lintas unit kerja	Program kerja mantap	Program pembangunan mantap	Koordinasi lancar

## PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2001-2002

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				
			2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemantapan dan pengembangan kelembagaan perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ketahanan pangan</li> <li>2. pengembangan agribisnis</li> <li>3. pengembangan perikanan rakyat terpadu</li> <li>4. pengembangan dan Pengelolaan sumberdaya kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rencana strategis pembangunan perikanan</li> <li>• perumusan program tahunan</li> <li>• pengadaan sarana monitoring evaluasi</li> <li>• koordinasi dan integrasi program</li> <li>• sosialisasi program</li> <li>• penataan kerjasama bilateral dan multilateral</li> <li>• pemberdayaan SDM perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan Renstra</li> <li>• penyusunan &amp; pemantau program</li> <li>• pengadaan sarana monitoring evaluasi</li> <li>• koordinasi dan integrasi program</li> <li>• perumusan kerjasama antar daerah dan instansi</li> <li>• pelaksanaan</li> <li>• optimalisasi SDM perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Pelaksanaan dan pemantauan program</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Koordinasi dan integrasi program</li> <li>• Pemantauan</li> <li>• Pemantapan dan pemantauan kerjasama</li> <li>• Pemantapan kinerja SDM perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Pelaksanaan dan pemantauan program</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Koordinasi dan integrasi program</li> <li>• Pemantauan</li> <li>• Pemantapan dan pemantauan kerjasama</li> <li>• Evaluasi pemantapan kinerja SDM perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian pelat Renstra</li> <li>• Monitoring serta penyus statistik</li> <li>• Peninjauan t sarana moni evaluasi</li> <li>• Evaluasi koc integrasi pro</li> <li>• Monitoring c sosialisasi pr</li> <li>• Evaluasi kerj bilateral</li> </ul>
2	Pemetaan sistem dan penegakan hukum		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan sistem dan penegakan hukum</li> <li>• Pengadaan database</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi peraturan perundangan perikanan</li> <li>• Meningkatkan pelayanan penyajian data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Pengolahan data statistik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Pengolahan data statistik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring e optimalisasi manusia peri</li> <li>• Monitoring e pengakajian pelaksanaan perundangan</li> </ul>
3	Pengembangan jaringan informasi, pemasaran dan prasarana		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan format data statistik tingkat nasional</li> <li>• Identifikasi potensi ikan hias</li> <li>• Identifikasi potensi ikan hias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian format data statistik</li> <li>• Pelaksanaan kerangka survey statistik dan identifikasi desa sampel</li> <li>• Pemantauan pemanfaatan potensi ikan hias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penyempurnaan format statistik perikanan</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi penyusunan format statistik perikanan</li> <li>• Review kerangka survey statistik</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring ev pengolahan da</li> <li>• Monitoring ev pengolahan da</li> <li>• Monitoring e kerangka sur</li> <li>• Pemanfaatan hias</li> </ul>

## PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2001-2005

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				
			2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7	
3			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan potensi perairan umum</li> <li>• Pemetaan potensi penangkapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan pemanfaatan potensi perairan umum</li> <li>• Pemantauan pemanfaatan potensi penangkapan</li> <li>• Pemetaan dan profil pengembangan usaha perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Progress report</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Pemantapan potensi SDM</li> <li>• Pengkajian tingkat pendapatan</li> <li>• Aplikasi</li> <li>• Pengadaan peralatan sarana kerja</li> <li>• Peningkatan pelayanan</li> <li>• Pencapaian target operasi</li> <li>• Pemberdayaan petugas humas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan perairan umum</li> <li>• Pemanfaatan penangkapan</li> </ul>
4	Percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktifitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program ketahanan pangan</li> <li>• Program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana tambak dinas</li> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana UPT (payau, tawar, penangkapan, pengujian mutu)</li> <li>• Identifikasi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana tambak dinas (lanjutan)</li> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana UPT (payau, tawar, penangkapan, pengujian mutu)</li> <li>• Prototipe penataan tata letak tambak dinas</li> <li>• Identifikasi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota (lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana tambak dinas (lanjutan)</li> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana UPT (payau, tawar, penangkapan, pengujian mutu)</li> <li>• Prototipe penataan tata letak tambak dinas (lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana tambak dinas (lanjutan)</li> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana UPT (payau, tawar, penangkapan, pengujian mutu)</li> <li>• Prototipe penataan tata letak tambak dinas (lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan prasarana tambak dinas (lanjutan)</li> <li>• Pembangunan prasarana (payau, tawar, pengujian mutu)</li> </ul>



1	KEBIJAKAN 2	PROGRAM 3	KEGIATAN				2
			2001 4	2002 5	2003 6	2004 7	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebersihan lingkungan PPI</li> <li>Penataan zonasi PPI</li> <li>Pengadaan bahan dan alat operasional PPI</li> <li>Sosialisasi visi dan misi PPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian/studi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>Monitoring saluran irigasi lintas daerah/kota</li> <li>Kebersihan lingkungan PPI (lanjutan)</li> <li>Penataan zonasi PPI (lanjutan)</li> <li>Sosialisasi kebersihan dan zonasi PPI</li> <li>Pengadaan bahan dan alat operasional PPI (lanjutan)</li> <li>Sosialisasi visi dan misi PPI (lanjutan)</li> <li>Studi penetapan standarisasi prasarana perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lanjutan kajian/studi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>Rehabilitasi saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>Pembangunan/pengadaan jembatan penghubung pada saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>Rehabilitasi jalan produksi dari sentra produksi kelokasi pemasaran</li> <li>lanjutan monitoring saluran irigasi lintas daerah/kota</li> <li>Kebersihan lingkungan PPI (lanjutan)</li> <li>Penataan zonasi PPI (lanjutan)</li> <li>Lanjutan sosialisasi kebersihan dan zonasi PPI</li> <li>pengadaan bahan dan alat operasional PPI (lanjutan)</li> <li>Sosialisasi visi dan misi PPI (lanjutan)</li> <li>lanjutan studi penetapan standarisasi prasarana perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lanjutan kajian/studi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>lanjutan rehabilitasi saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>lanjutan pembangunan/pengadaan jembatan penghubung pada saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>lanjutan rehabilitasi jalan produksi dari sentra produksi kelokasi pemasaran</li> <li>lanjutan monitoring saluran irigasi lintas daerah/kota</li> <li>Kebersihan lingkungan PPI (lanjutan)</li> <li>Penataan zonasi PPI</li> <li>Lanjutan sosialisasi kebersihan dan zonasi PPI</li> <li>pengadaan bahan dan alat operasional PPI (lanjutan)</li> <li>Sosialisasi visi dan misi PPI (lanjutan)</li> <li>evaluasi kinerja pelabuhan perikanan/PPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lanjutan rel saluran irigasi daerah kabu</li> <li>lanjutan pe... pengadaan, penghubung irigasi lintas kabupaten/k</li> <li>lanjutan mo... saluran irigasi daerah/kota</li> <li>evaluasi kine... pelabuhan p</li> </ul>
Skripsi			Evaluasi penerapan anggaran ...			Yeni Nurhidayati	

## PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2001-2005

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				
			2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan/pengembangan fasilitas PPI (lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sosialisasi prosedur pembangunan prasarna perikanan (SIDCOM)</li> <li>Pembangunan los pasar ikan di PPI</li> <li>Pengadaan tempat pencucian ikan di PPI</li> <li>Pembangunan tempat pengepakan ikan (pasca panen) di PPI</li> <li>Pembangunan/pengembangan fasilitas PPI (lanjutan)</li> <li>Identifikasi pengembangan PPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lanjutan sosialisasi prosedur pembangunan prasarna perikanan (SIDCOM)</li> <li>identifikasi sedimentasi kolam pelabuhan dan alur pelayaran PPI</li> <li>Pembangunan los pasar ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Pengadaan tempat pencucian ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Lanjutan pembangunan tempat pengepakan ikan (pasca panen) di PPI</li> <li>Pembangunan/pengembangan fasilitas PPI (lanjutan)</li> <li>Identifikasi pengembangan PPI (lanjutan)</li> <li>Reklamasi lahan pasang surut/ pantai dan pembebasan lahan daratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>identifikasi sedimentasi kolam pelabuhan dan alur pelayaran PPI</li> <li>pengerukan sedimentasi pada alur pelayaran dan kolam pelabuhan perikanan (PPI)</li> <li>Pembangunan los pasar ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Pengadaan tempat pencucian ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Lanjutan pembangunan tempat pengepakan ikan (pasca panen) di PPI</li> <li>Pembangunan/pengembangan fasilitas PPI (lanjutan)</li> <li>Reklamasi lahan pasang surut/ pantai dan pembebasan lahan daratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lanjutan pengendalian sedimentasi pelayaran dan pelabuhan perikanan</li> <li>Pembangunan los pasar ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Lanjutan pembangunan tempat pencucian ikan di PPI</li> <li>Lanjutan pembangunan tempat pengepakan ikan (pasca panen) di PPI</li> <li>Reklamasi lahan pasang surut/ pantai dan pembebasan lahan daratan</li> </ul>



## PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2001-2002

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				
			2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemantapan dan pengembangan kelembagaan perikanan dan kelautan	1. ketahanan pangan 2. pengembangan agribisnis 3. pengembangan perikanan rakyat terpadu 4. pengembangan dan Pengelolaan sumberdaya kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>rencana strategis pembangunan perikanan</li> <li>perumusan program tahunan</li> <li>pengadaan sarana monitoring evaluasi</li> <li>koordinasi dan integrasi program</li> <li>sosialisasi program</li> <li>penataan kerjasama bilateral dan multilateral</li> <li>pemberdayaan SDM perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan Renstra</li> <li>penyusunan&amp;pemantau program</li> <li>pengadaan sarana monitoring evaluasi</li> <li>koordinasi dan integrasi program</li> <li>perumusan kerjasama antar daerah dan instansi</li> <li>pelaksanaan</li> <li>optimalisasi SDM perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring evaluasi</li> <li>Pelaksanaan dan pemantauan program</li> <li>Monitoring evaluasi</li> <li>Koordinasi dan integrasi program</li> <li>Pemantauan</li> <li>Pemantapan dan pemantauan kerjasama</li> <li>Pemantapan kinerja SDM perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring evaluasi</li> <li>Pelaksanaan dan pemantauan program</li> <li>Monitoring evaluasi</li> <li>Koordinasi dan integrasi program</li> <li>Pemantauan</li> <li>Pemantapan dan pemantauan kerjasama</li> <li>Evaluasi pemantapan kinerja SDM perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian pola Renstra</li> <li>Monitoring serta penyusunan statistik</li> <li>Peninjauan sarana monitoring evaluasi</li> <li>Evaluasi koordinasi integrasi program</li> <li>Monitoring dan sosialisasi program</li> <li>Evaluasi kerjasama bilateral</li> </ul>
2	Pemetaan sistem dan penegakan hukum		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan sistem dan penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisi peraturan perundangan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring evaluasi optimalisasi manusia perikanan</li> </ul>
3	Pengembangan jaringan informasi, pemasaran dan prasarana		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan database</li> <li>Pembahasan format data statistik tingkat nasional</li> <li>Identifikasi potensi ikan hias</li> <li>Identifikasi potensi ikan hias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan penyajian data</li> <li>Kajian format data statistik</li> <li>Pelaksanaan kerangka survey statistik dan identifikasi desa sampel</li> <li>Pemantauan pemanfaatan potensi ikan hias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan data statistik</li> <li>Penyusunan dan penyempurnaan format statistik perikanan</li> <li>Monitoring evaluasi</li> <li>Monitoring evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan data statistik</li> <li>Sosialisasi penyusunan format statistik perikanan</li> <li>Review kerangka survey statistik</li> <li>Monitoring evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring evaluasi pengkajian pelaksanaan perundangan</li> <li>Monitoring evaluasi pengolahan data</li> <li>Monitoring evaluasi pengolahan data</li> <li>Monitoring evaluasi kerangka survey</li> <li>Pemanfaatan ikan hias</li> </ul>

## PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2001-2005

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				
			2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
3			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan potensi perairan umum</li> <li>• Pemetaan potensi penangkapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan pemanfaatan potensi perairan umum</li> <li>• Pemantauan pemanfaatan potensi penangkapan</li> <li>• Pemetaan dan profil pengembangan usaha perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Progress report</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Monitoring evaluasi</li> <li>• Pemantapan potensi SDM</li> <li>• Pengkajian tingkat pendapatan</li> <li>• Aplikasi</li> <li>• Pengadaan peralatan sarana kerja</li> <li>• Peningkatan pelayanan</li> <li>• Pencapaian target operasi</li> <li>• Pemberdayaan petugas humas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan perairan umum</li> <li>• Pemanfaatan penangkapan</li> </ul>
4	Percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktifitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program ketahanan pangan</li> <li>• Program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana tambak dinas</li> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana UPT (payau,tawar,penangkapan,pengujian mutu)</li> <li>• Identifikasi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana tambak dinas (lanjutan)</li> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana UPT (payau,tawar,penangkapan,pengujian mutu)</li> <li>• Prototipe penataan tata letak tambak dinas</li> <li>• Identifikasi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota (lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana tambak dinas (lanjutan)</li> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana UPT (payau,tawar,penangkapan,pengujian mutu)</li> <li>• Prototipe penataan tata letak tambak dinas (lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana tambak dinas (lanjutan)</li> <li>• Pembangunan/pengembangan prasarana UPT (payau,tawar,penangkapan,pengujian mutu)</li> <li>• Prototipe penataan tata letak tambak dinas (lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan prasarana tambak dinas (lanjutan)</li> <li>• Pembangunan prasarana (payau,tawar,pengujian)</li> </ul>

1	KEBIJAKAN 2	PROGRAM 3	KEGIATAN				
			2001 4	2002 5	2003 6	2004 7	2005 8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebersihan lingkungan PPI</li> <li>• Penataan zonasi PPI</li> <li>• Pengadaan bahan dan alat operasional PPI</li> <li>• Sosialisasi visi dan misi PPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian studi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>• Monitoring saluran irigasi lintas daerah/kota</li> <li>• Kebersihan lingkungan PPI (lanjutan)</li> <li>• Penataan zonasi PPI (lanjutan)</li> <li>• Sosialisasi kebersihan dan zonasi PPI</li> <li>• Pengadaan bahan dan alat operasional PPI (lanjutan)</li> <li>• Sosialisasi visi dan misi PPI (lanjutan)</li> <li>• Studi penetapan standarisasi prasarana perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lanjutan kajian/studi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>• Rehabilitasi saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>• Pembangunan/pengadaan jembatan penghubung pada saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>• Rehabilitasi jalan produksi dari sentra produksi kelokasi pemasaran</li> <li>• lanjutan monitoring saluran irigasi lintas daerah/kota</li> <li>• Kebersihan lingkungan PPI (lanjutan)</li> <li>• Penataan zonasi PPI (lanjutan)</li> <li>• Lanjutan sosialisasi kebersihan dan zonasi PPI</li> <li>• pengadaan bahan dan alat operasional PPI (lanjutan)</li> <li>• Sosialisasi visi dan misi PPI (lanjutan)</li> <li>• lanjutan studi penetapan standarisasi prasarana perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lanjutan kajian/studi prasarana budidaya lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>• lanjutan rehabilitasi saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>• lanjutan pembangunan/pengadaan jembatan penghubung pada saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>• lanjutan rehabilitasi jalan produksi dari sentra produksi kelokasi pemasaran</li> <li>• lanjutan monitoring saluran irigasi lintas daerah/kota</li> <li>• Kebersihan lingkungan PPI (lanjutan)</li> <li>• Penataan zonasi PPI</li> <li>• Lanjutan sosialisasi kebersihan dan zonasi PPI</li> <li>• pengadaan bahan dan alat operasional PPI (lanjutan)</li> <li>• Sosialisasi visi dan misi PPI (lanjutan)</li> <li>• evaluasi kinerja pelabuhan perikanan/PPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lanjutan rehabilitasi saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>• lanjutan pembangunan/pengadaan jembatan penghubung pada saluran irigasi lintas daerah kabupaten/kota</li> <li>• lanjutan monitoring saluran irigasi lintas daerah/kota</li> <li>• lanjutan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan/PPI</li> </ul>

## PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2001-2005

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN				
			2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan/pengembangan fasilitas PPI (lanjutan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sosialisasi prosedur pembangunan prasarna perikanan (SIDCOM)</li> <li>Pembangunan los pasar ikan di PPI</li> <li>Pengadaan tempat pencucian ikan di PPI</li> <li>Pembangunan tempat pengepakan ikan (pasca panen) di PPI</li> <li>Pembangunan/pengembangan fasilitas PPI (lanjutan)</li> <li>Identifikasi pengembangan PPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lanjutan sosialisasi prosedur pembangunan prasarna perikanan (SIDCOM)</li> <li>identifikasi sedimentasi kolam pelabuhan dan alur pelayaran PPI</li> <li>Pembangunan los pasar ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Pengadaan tempat pencucian ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Lanjutan pembangunan tempat pengepakan ikan (pasca panen) di PPI</li> <li>Pembangunan/pengembangan fasilitas PPI (lanjutan)</li> <li>Identifikasi pengembangan PPI (lanjutan)</li> <li>Reklamasi lahan pasang surut/ pantai dan pembebasan lahan daratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>identifikasi sedimentasi kolam pelabuhan dan alur pelayaran PPI</li> <li>pengerukan sedimentasi pada alur pelayaran dan kolam pelabuhan perikanan (PPI)</li> <li>Pembangunan los pasar ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Pengadaan tempat pencucian ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Lanjutan pembangunan tempat pengepakan ikan (pasca panen) di PPI</li> <li>Pembangunan/pengembangan fasilitas PPI (lanjutan)</li> <li>Reklamasi lahan pasang surut/ pantai dan pembebasan lahan daratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lanjutan pengendalian sedimentasi pada alur pelayaran dan kolam pelabuhan perikanan (PPI)</li> <li>Pembangunan los pasar ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Lanjutan pembangunan tempat pencucian ikan di PPI (lanjutan)</li> <li>Lanjutan pembangunan tempat pengepakan ikan (pasca panen) di PPI</li> <li>Reklamasi lahan pasang surut/ pantai dan pembebasan lahan daratan</li> </ul>

No	KEGIATAN	TARGET	INDIKATOR KINERJA					ASUMSI
			INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT	
1	Pelaksanaan pemaanfaatan program	Pelaksanaan kegiatan 80% sesuai program pembangunan perikanan dan kelautan	Dana, tenaga, indikator keberhasilan program	Laporan program tahunan	Mencerminkan hasil pelaksanaan program pembangunan perikanan & kelautan jangka pendek	Pencapaian sasaran tujuan jangka pendek/menengah	Peningkatan pendapatan dan kegiatan masyarakat perikanan	Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program nasional, daerah & dinas perikanan dan kelautan
2	Evaluasi pemanfaatan kinerja SDM perikanan	SDM yang terampil	Dana, tenaga, sarana kerja	Laporan tingkat kemajuan SDM	Tenaga perikanan yang terampil	Mudah menyerap IPTEK	Mendukung pembangunan perikanan & kelautan mencapai target & sasaran	Tingkat pendidikan SDM mempunyai motivasi yang tinggi
3	Evaluasi pemanfaatan alat peraga	Mengetahui ekektifitas penggunaan alat peraga	Dukungan dana tenaga dan sarana kerja	Alat peraga mudah dipahami & mudah dioperasikan	Kelestarian sumber daya ikan terjamin	Terjaminnya pemasaran & meningkatkan pendapatan	Ekosistem sumber daya perikanan terproteksi	Efektifitas teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan
4	Penerapan pengelolaan sumber daya pesisir	Keterpaduan pengelolaan sumber daya pesisir	Dukungan dana, tenaga dan sarana kerja	Terjaminnya fungsi & pemanfaatan ruang pesisir secara optimal & berkelanjutan	Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir	Terhindarnya konflik pemanfaatan sumber daya yang dapat merusak ekosistem	Kelestarian sumber daya dan ekosistem	Keterpaduan stakeholder untuk memanfaatkan potensi pasar
5	Monitoring & evaluasi pengelolaan usaha perikanan & kelautan	Terjaminnya kelestarian sumber daya perikanan & kelautan	Dukungan dana, tenaga dan sarana kerja	Memudahkan alokasi usaha perikanan & kelautan	Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat tentang pengelolaan SDI	Efisiensi penggunaan jenis alat tangkap	Sebagai tolok ukur dalam menangani kasus pelanggaran	Partisipasi dari semua pihak khususnya nelayan
6	Evaluasi kinerja PPNS	Mengetahu sejauh mana sistem kinerja PPNS	Dukungan dana, tenaga & sarana kerja	Profesionalisme PPNS dalam membantu penyelesaian kasus pelanggaran	Mengurangi kasus pelanggaran perairan	Menurunnya konflik nelayan	Meningkatnya kemampuan PPNS dalam menguasai teknik pengawasan	Koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait
7	Monitoring & evaluasi potensi perairan umum	Data pengelolaan potensi perairan umum	Dana, tenaga, sarana kerja	Mengetahui tingkat pemanfaatan potensi perairan umum	Data pemanfaatan potensi perairan umum	Pemanfaatan potensi perairan umum secara optimal	Pemanfaatan secara terkendali	Dukungan teknologi, ketersediaan potensi, SDM yang memadai

8	Pelaksanaan Pemanfaatan program	Pelaks. Keg. 80% sesuai program pembangunan perikanan&kelautan	dana,tenaga,indikator keberhasilan program	laporan program tahunan	Mencerminkan hsl pelaksanaan program pembangunan perikanan&kelautan jangka pendek	Pencapaian sasaran tujuan jangka pendek/menengah	peningkatan pendapatan &kegiatan masyarakat perikanan	Keg.yang dilaks mengacu pada prog.nasional, daerah&dinas perikanan&kelautan
9	Pemantauan penataan kerja sama bilateral&multilateral	menyerap ilmu pengetahuan&teknologi	Dana,tenaga,peralatan	Paket teknologi&peningkatan kemampuan	peningkatan kualitas SDM & SDP	Kemampuan SDM meningkat	peningkatan produktivitas&pendapatan	Pelaksanaan kerjasama terjalin baik, tingkat pendidikan SDM
10	Monitoring, evaluasi, penataan sistem&penegakan hkm	Peraturan&perundang-an telah dpt dilaksanakan	dana,tenaga,sarana kerja	Mengukur pemahaman &pelaksanaan penegakan hkm	Pengendalian keamanan	Frek konflik berkurang	terciptanya situasi aman dan terkendali	tingkat kesadaran masyarakat
11	Sosialisasi penyajian format statistik perikanan&kelautan	penggunaan statistik yang standar	dana,tenaga,sarana kerja	Pemahaman penggunaan format statistik standar	Pemakaian tabel/format yang telah diperbaiki	Pengolahan data yang lebih efektif&efisien	data akurat, tepat waktu	kemampuan SDM, data tersedia
12	pemantapan pelayanan jasa	kepuasan pelayanan pemakai jasa	dukungan dana,SDM dan sarana prasarana	masyarakat terpenuhi kebutuhan pelayanan	pelayanan. sepat, data akurat	komoditas perikanan sesuai keinginan pasar	komoditas perikanan dpt diterima pasar global	produktivitas perikanan lancar
13	Pengkajian tingkat pendapatan	Pendapatan sesuai standar	profesionalisme SDM	Pendapatan sesuai UMR	Pelaksanaan pekerjaan lebih optimal	Kebutuhan SOM cukup terpenuhi	Tercapainya sasaran pembangunan	Tersedia dana alokasi pendapatan
14	Peningkatan sarana kerja	Sarana kerja memadai	Dukungan dana	Jumlah sarana kerja cukup	Produktivitas meningkat	Sasaran program tercapai	Tercapainya sasaran pembangunan	SDM terpenuhi kualitas dan kuantitas
15	Pencapaian target operasional	Target terpenuhi	Dana pengelolaan, pelaksanaan, pengelola	Operasional berjalan lancar	Aset dimanfaatkan dengan baik, memberi nilai (+)	sasaran program tercapai	Sasaran pembangunan tercapai	Adanya sistem pengelolaan yang terprogram
16	Koordinasi kelembagaan	Sinkronisasi kelembagaan	Dana,konsolidasi	Kelembagaan lebih mantap	Kerjasama lintas unit kerja	Program kerja mantap	Program pembangunan mantap	Koordinasi lancar



8	Pelaksanaan Pemanfaatan program	Pelaks. Keg. 80% sesuai program pembangunan perikanan&kelautan	dana,tenaga,indikator keberhasilan program	laporan program tahunan	Mencerminkan hsl pelaksanaan program pembangunan perikanan&kelautan jangka pendek	Pencapaian sasaran tujuan jangka pendek/menengah	peningkatan pendapatan &kegiatan masyarakat perikanan	Keg. yang dilaks mengacu pada prog.nasional, daerah&dinas perikanan&kelautan
9	Pemantauan penataan kerja sama bilateral&multilateral	menyerap ilmu pengetahuan&teknologi	Dana,tenaga,peralatan	Paket teknologi&peningkatan kemampuan	peningkatan kualitas SDM & SDP	Kemampuan SDM meningkat	peningkatan produktivitas&pendapatan	Pelaksanaan kerjasama terjalin baik, tingkat pendidikan SDM
10	Monitoring, evaluasi, penataan sistem&penegakan hkm	Peraturan&perundang-an telah dpt dilaksanakan	dana,tenaga,sarana kerja	Mengukur pemahaman &pelaksanaan penegakan hkm	Pengendalian keamanan	Frek.konflik berkurang	terciptanya situasi aman dan terkendali	tingkat kesadaran masyarakat
11	Sosialisasi penyajian format statistik perikanan&kelautan	penggunaan statistik yang standar	dana,tenaga,sarana kerja	Pemahaman penggunaan format statistik standar	Pemakaian tabel/format yang telah diperbaiki	Pengolahan data yang lebih efektif&efisien	data akurat,tepat waktu	kemampuan SDM, data tersedia
12	pemantapan pelayanan jasa	kepuasan pelayanan pemakai jasa	dukungan dana,SDM dan sarana prasarana	masyarakat terpenuhi kebutuhan pelayanan	pelayanan, tepat, data akurat	komoditas perikanan sesuai keinginan pasar	komoditas perikanan dpt diterima pasar global	produktivitas perikanan lancar
13	Pengkajian tingkat pendapatan	Pendapatan sesuai standar	profesionalisme SDM	Pendapatan sesuai UMR	Pelaksanaan pekerjaan lebih optimal	Kebutuhan SDM cukup terpenuhi	Tercapainya sasaran pembangunan	Tersedia dana alokasi pendapatan
14	Peningkatan sarana kerja	Sarana kerja memadai	Dukungan dana	Jumlah sarana kerja cukup	Produktivitas meningkat	Sasaran program tercapai	Tercapainya sasaran pembangunan	SDM terpenuhi kualitas dan kuantitas
15	Pencapaian target operasional	Target terpenuhi	Dana pengelolaan, pelaksanaan,pengelolaan	Operasional berjalan lancar	Aset dimanfaatkan dengan baik,memberi nilai (+)	sasaran program tercapai	Sasaran pembangunan tercapai	Adanya sistem pengelolaan yang terprogram
16	Koordinasi kelembagaan	Sinkronisasi kelembagaan	Dana,konsolidasi	Kelembagaan lebih mantap	Kerjasama lintas unit kerja	Program kerja mantap	Program pembangunan mantap	Koordinasi lancar